

# STATISTIK DAERAH

PROVINSI DKI JAKARTA



2017



BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI DKI JAKARTA



# STATISTIK DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA 2017

<https://jakarta.bps.go.id>

<https://jakarta.bps.go.id>

© Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017

ISSN : 2087-6238  
No. Publikasi : 31550.13.02  
Katalog BPS : 1101002.31

Editor : Rudiansyah  
Penulis : Rocky Gunung Hasudungan  
Ratih Sari Dewi  
Infografis : Ratih Sari Dewi  
Ita Amalia  
Kadek Swarniati  
Design Cover : Ratih Sari Dewi

Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017  
iii + 42 halaman; 176 x 250 mm

# Kata Pengantar



Publikasi Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 merupakan seri publikasi tahunan BPS yang menyajikan beragam jenis data yang bersumber dari BPS dan institusi lain. Publikasi ini memuat berbagai informasi/indikator terpilih terkait dalam pembangunan di berbagai sektor serta dianalisis secara sederhana untuk membantu pengguna data memahami perkembangan serta potensi yang ada.

Publikasi ini diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Statistik Nasional sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan pengguna data akan kompilasi data yang terkini dengan tampilan yang fresh disertai ulasan singkat.

Publikasi Statistik Daerah akan terus mengalami penyempurnaan baik struktur, ulasan maupun mutunya. Untuk itu kritik dan saran konstruktif berbagai pihak kami harapkan untuk penyempurnaan penerbitan mendatang. Semoga publikasi ini mampu memenuhi tuntutan kebutuhan data statistik, baik oleh instansi/dinas pemerintah, swasta, kalangan akademisi maupun masyarakat luas.

Jakarta, 26 September 2017

Kepala BPS Provinsi DKI Jakarta

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Thoman', written over a horizontal line.

Thoman Pardosi



# Daftar Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
Statistik Kunci	1
<hr/>	
1. Geografi dan Iklim	3
2. Pemerintahan	4
3. Penduduk	6
4. Pembangunan Manusia	7
5. Ketenagakerjaan	8
6. Kesehatan	10
7. Pendidikan	12
8. Perumahan	14
9. Kemiskinan	15
10. Pertanian	16
11. Energi dan Air bersih	17
12. Industri Pengolahan	18
13. Konstruksi	19
14. Hotel dan Pariwisata	20
15. Transportasi dan Komunikasi	21
16. Perbankan dan Investasi	22
17. Harga-harga	23
18. Pengeluaran Penduduk	24
19. Perdagangan	25
20. Pendapatan Regional	27
21. Perbandingan Regional	29
Lampiran Tabel	31



# Statistik Kunci

Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017
<b>SOSIAL</b>					
Jumlah Penduduk <sup>1)</sup>	Ribu Jiwa	10 075,3	10 177,9	10 277,6	10 374,2
Laju Pertumbuhan Penduduk (tahun dasar 2010) <sup>1)</sup>	%	1,11	1,09	1,07	1,06
Kepadatan Penduduk <sup>1)</sup>	Jiwa /Km <sup>2</sup>	15 212	15 367	15 518	15 663
Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) <sup>1)</sup>	%	101,29	101,04	100,82	100,61
Jumlah Rumah Tangga (Ruta) <sup>1)</sup>	Juta Ruta	2,63	2,66	2,69	2,72
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) <sup>2)</sup>	%	68,49	72,60	68,79	70,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) <sup>2)</sup>	%	9,84	8,36	5,77	5,36
Jumlah Penduduk Miskin <sup>3)</sup>	Ribu Orang	393,98	398,92	384,30	389,69
Persentase Penduduk Miskin <sup>3)</sup>	%	3,92	3,93	3,75	3,77
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	78,39	78,99	79,60	
<b>EKONOMI</b>					
PDRB Harga Berlaku <sup>4)</sup>	Triliun Rp	1 762,32	1 989,33	2 177,12	1 053,78
PDRB Harga Konstan 2010 <sup>4)</sup>	Triliun Rp	1 373,39	1 454,39	1 536,46	752,98
Laju Pertumbuhan Ekonomi <sup>4)</sup>	%	5,91	5,89	5,85	6,20
PDRB Perkapita Harga Berlaku <sup>4)</sup>	Juta Rp	174,91	195,46	207,99	
Inflasi <sup>5)</sup>	%	8,95	3,30	0,99	2,31
Ekspor Produk DKI Jakarta (FOB) <sup>4)</sup>	Juta USD	11 546,19	11 544,15	11 033,05	4 358,17
Ekspor melalui pelabuhan di DKI Jakarta (FOB) <sup>4)</sup>	Juta USD	48 079,48	42 184,09	41 905,84	11 187,27
Impor melalui pelabuhan di DKI Jakarta (CIF) <sup>4)</sup>	Juta USD	84 604,81	71 154,56	71 444,35	37 254,09
Jumlah Wisatawan Mancanegara <sup>4)</sup>	Juta Orang	2,32	2,37	1,08	1,19

<sup>1)</sup> Hasil Proyeksi Penduduk berdasarkan SP2010

<sup>2)</sup> Keadaan Bulan Februari

<sup>3)</sup> Keadaan Bulan Maret

<sup>4)</sup> Tahun 2017, keadaan s/d Semester I

<sup>5)</sup> Tahun 2017, Inflasi dihitung berdasarkan IHK Agustus 2017 terhadap Desember 2016



# GEOGRAFI DAN IKLIM

# 1

**DKI Jakarta adalah provinsi dengan luas terkecil di Indonesia**

*Luas wilayah provinsi DKI Jakarta hanya 0,035 persen luas daratan Indonesia dan hanya 0,57 persen luas pulau Jawa*

## GEOGRAFI

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terletak pada posisi 6°12' LS dan 106°48' BT serta terbentang pada hamparan tanah seluas 662,33 km<sup>2</sup>. Dengan luas wilayah kurang dari 0,04% dari total luas wilayah daratan Indonesia namun dihuni oleh 4% dari total penduduk Indonesia. DKI Jakarta juga memiliki 218 pulau yang terletak di Kabupaten Kepulauan Seribu, namun hanya sekitar setengahnya saja yang berpenghuni.

Secara geografis Jakarta berbatasan dengan Provinsi Banten disebelah barat dan Provinsi Jawa Barat di timur dan selatan serta Laut Jawa di utara. Di bagian utara terbentang pantai sepanjang ± 35 km tempat bermuaranya 13 sungai dan 2 kanal (Sumber: Dinas PU DKI Jakarta). Data dari Dinas Pekerjaan Umum Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa 73% kelurahan di DKI Jakarta dilalui aliran sungai. Hal ini mengakibatkan tingginya potensi terjadinya bencana banjir khususnya pada musim penghujan.

## IKLIM

Kondisi udara di DKI Jakarta pada medio tahun 2017 hampir serupa dengan yang terjadi pada tahun 2015. Suhu udara yang cukup menyengat terjadi pada sepanjang bulan Juli dan Agustus tahun 2017. Demikian halnya dengan curah hujan yang hanya turun sesekali dengan lokasi area yang tidak merata.

Intensitas hujan di DKI Jakarta pada periode bulan Juli-Agustus 2017 menunjukkan penurunan yang signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu rata-rata hanya 70 mm. Tetapi perbedaan rata-rata suhu tidak sebesar tahun 2015.

Menurut data BMKG, sepanjang tahun 2016, rata-rata suhu udara DKI Jakarta adalah sebesar 28°C. Suhu yang realtif sedang untuk daerah tropis. Arah angin di DKI Jakarta rata-rata bertiup dari Utara. Sementara rata-rata kecepatan angin sepanjang tahun 2016 berkisar antara 1,4 sampai dengan 3 m/s.



Sumber: Badan Meteorologi Klimatologi & Geofisika, Stasiun Pondok Betung & Kemayoran

**fyi,**

“73% kelurahan di Jakarta dilalui aliran sungai, menjadikan Jakarta rawan bencana banjir”

## Statistik Geografi DKI Jakarta, 2016



Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017

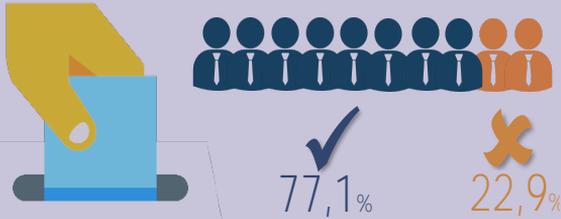
# 2

## PEMERINTAHAN

Sepanjang 2016, DPRD Provinsi DKI Jakarta Menyusun Sebanyak 54 Keputusan

Produk yang dihasilkan meningkat, antara lain 51 keputusan dewan dan 3 peraturan daerah, hal ini seiring dengan meningkatnya jumlah permasalahan yang disampaikan masyarakat

### Partisipasi masyarakat DKI Jakarta yang Memiliki Hak Suara dalam Pilkada 2017



Sumber: KPUD DKI Jakarta

### PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2017

Pesta demokrasi di Provinsi DKI Jakarta baru saja digelar beberapa bulan yang lalu, namun euforinya telah dimulai sejak jauh sebelumnya. Ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi DKI Jakarta menjadi pesta demokrasi besar mengingat wilayahnya sebagai ibukota negara yang bergandengan langsung dengan pemerintah pusat. Kampanye politik terlihat di berbagai siaran televisi, radio, media masa, maupun di masyarakat langsung. Pesat demokrasi ini tidak hanya meriah di wilayah Jakarta saja, namun telah menjadi topik nasional. Berbagai strategi dan polemik mewarnai topik pokok tersebut. Terjadi persaingan sengit para calon pemimpin Jakarta sehingga pilkada tersebut harus dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu pada tanggal 15 Februari 2017 dan putaran kedua pada tanggal 19 April 2017.

Menurut catatan KPUD Provinsi DKI Jakarta, masyarakat ibukota yang menggunakan hak suaranya adalah sebesar 77,1 persen, sedangkan sisanya sebesar 22,9 persen tidak menggunakan hak suaranya.

### DPRD PROVINSI DKI JAKARTA, 2014-2019

Keterwakilan perempuan dalam kancah politik Jakarta masih sangat minim. Tercatat dari total 106 anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, 20 orang diantaranya adalah perempuan atau hanya sekitar 19 persen. Walaupun meningkat sekitar 1 persen dibandingkan tahun lalu, para politisi perempuan membutuhkan kegigihan yang ekstra untuk dapat memperjuangkan hak-hak perempuan di ibukota.

Para politisi Kebon Sirih (sebutan gedung DPRD DKI Jakarta) berhasil menghasilkan produk berupa 54 keputusan, diantaranya keputusan dewan sebanyak 51 dan peraturan daerah sebanyak 3, meningkat 14,89 persen dibandingkan tahun 2015. Hal ini seiring dengan meningkatnya permasalahan yang disampaikan delegasi masyarakat. Peningkatan masalah paling tinggi terjadi pada jenis permasalahan pertanahan dan tempat tinggal (900 persen), transportasi (400 persen), dan tenaga kerja (66,67 persen).

### Komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Menurut Jenis Kelamin Hasil Pemilu Legislatif 2014



### Komposisi Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta Menurut Partai Politik Hasil Pemilu Legislatif 2014



Sumber: Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta

# PEMERINTAHAN

# 2

## Realisasi Belanja Daerah Tahun 2016 Mencapai 83,56 persen dari Target

Dengan total realisasi pendapatan sebesar Rp 54,34 triliun, Pemprov DKI Jakarta

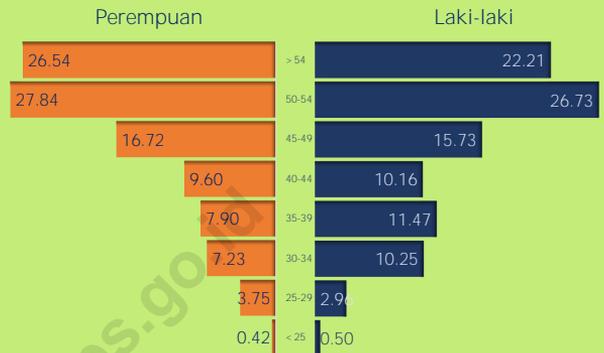
### APARATUR PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

Menurut data dari Badan Kepegawaian Daerah, PNS DKI Jakarta paling banyak terdapat pada kelompok umur 50 tahun ke atas yaitu mencapai 51,72 persen (laki-laki dan perempuan). Sementara untuk kelompok umur di bawah 30 tahun hanya sebesar 3,82 persen. Kondisi ini menggambarkan sangat perlunya regenerasi aparatur pemerintah daerah terutama dalam hal kurangnya tenaga kreatif dan profesional yang melek teknologi serta awam dengan perkembangan globalisasi. Dalam 5-10 tahun ke depan Pemprov DKI Jakarta akan kehilangan setengah dari aparturnya karena akan memasuki masa purna bhakti.

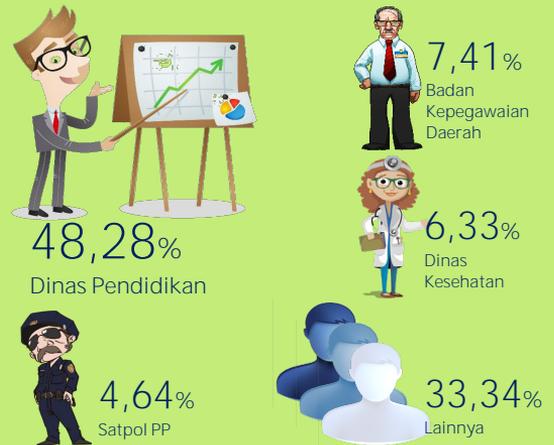
Pelayanan di bidang Pendidikan merupakan sektor paling serius yang diurus oleh Pemprov DKI Jakarta. Dari sekitar 71 ribu pegawainya, 44,28 persennya terlibat dalam hal mengurus masalah pendidikan di ibukota. Hal ini sejalan dengan besarnya anggaran Pemprov DKI Jakarta pada sektor tersebut. Tiga sektor lainnya yang juga mendapatkan perhatian yang cukup penting dalam hal melayani kebutuhan masyarakat di ibukota adalah Aparatur Pemerintah (BKD), Kesehatan, dan Keamanan (Satpol PP). Selain itu pelayanan terkait penanggulangan bencana, transportasi, dan perizinan juga menjadi fokus dalam hal kebutuhan pegawai.

Berbagai inovasi pelayanan dan kinerja yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta selama ini nampaknya berdampak positif. Sampai dengan akhir tahun 2016, realisasi pendapatan daerah mencapai 95,06 persen dari target atau sebesar Rp 54,34 triliun. Sumber terbesar dari pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai Rp 39,05 triliun (realisasi 101,43 persen) dan Dana Perimbangan yang mencapai Rp 12,40 triliun (realisasi 77,53 persen). Sementara itu realisasi belanja daerah mencapai Rp 47,93 triliun atau 83,56 persen dari yang dianggarkan. Sebagian besar belanja digunakan untuk belanja langsung barang dan jasa, barang modal, dll. Hal ini secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta dalam hal investasi daerah.

### Komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, 2016



### Komposisi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menurut Unit Organisasi Terbesar, 2016



### Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2016



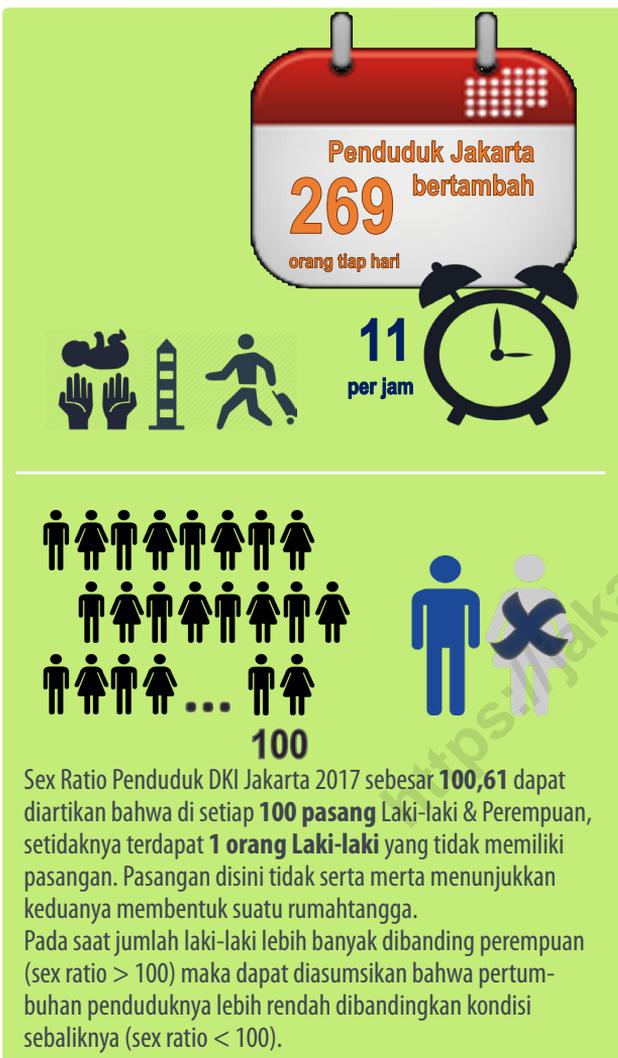
Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

# 3

## PENDUDUK

### Penduduk DKI Jakarta Tahun 2017 tumbuh sebesar 0,94 persen

Penduduk Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 (kondisi tengah tahun) mencapai 10,37 juta jiwa, Jakarta Barat adalah kota terpadat dan tumbuh paling tinggi yaitu sebesar 1,28 persen



Penduduk, Laju, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2016-2017

Kabupaten/ Kota	Penduduk		Laju Pertumbuhan		Kepadatan	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Kepulauan Seribu	23,616	23,897	1.18	1.19	2,714	2,747
Jakarta Selatan	2,206,732	2,226,830	0.96	0.91	15,621	15,763
Jakarta Timur	2,868,910	2,892,783	0.88	0.83	15,258	15,385
Jakarta Pusat	917,754	921,344	0.39	0.39	19,068	19,143
Jakarta Barat	2,496,002	2,528,065	1.32	1.28	19,268	19,516
Jakarta Utara	1,764,614	1,781,316	0.99	0.95	12,032	12,146
<b>DKI JAKARTA</b>	<b>10,277,628</b>	<b>10,374,235</b>	<b>0.98</b>	<b>0.94</b>	<b>15,517</b>	<b>15,663</b>

Sumber: Proyeksi Penduduk Sensus Penduduk 2010 Jakarta Dalam Angka, 2017

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara selalu menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang dan tinggal. Pertambahan penduduk akibat arus urbanisasi terus meningkat. Pemerintah provinsi pun tak cukup kuat membuat kebijakan untuk menekan laju urbanisasi tersebut. Akibatnya, jumlah penduduk DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, termasuk yang disebabkan oleh pertumbuhan alami. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk dari Hasil Sensus Penduduk 2010, jumlah penduduk Jakarta tahun 2015 sebesar 10,18 juta jiwa, tahun 2016 sebesar 10,28 juta jiwa, dan tahun 2017 meningkat menjadi 10,37 juta jiwa. Angka tersebut bahkan melebihi penduduk negara Portugal (sumber: [www.worldometers.info](http://www.worldometers.info)). Dapat dikatakan selama dua tahun terakhir, secara rata-rata penduduk Jakarta bertambah 269 orang setiap harinya dan 11 orang setiap jamnya.

DKI Jakarta adalah provinsi dengan penduduk terpadat di Indonesia dimana kepadatannya mencapai lebih dari 15,68 ribu jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2017. Angka ini terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan jumlah penduduk sebesar 2,53 juta jiwa, Jakarta Barat menjadi kota terpadat di DKI Jakarta dengan kepadatan mencapai 19,52 juta jiwa/km<sup>2</sup>. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan penduduknya sebagai laju tertinggi sebesar 1,28 persen. Pertumbuhan hunian di Jakarta Barat menjadi salah satu pemicu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi.

Sex Ratio atau perbandingan penduduk laki-laki dan perempuan di DKI Jakarta tahun 2017 mencapai 100,61 artinya penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Dapat dikatakan bahwa diantara 100 pasang laki-laki dan perempuan, terdapat 1 orang laki-laki yang tidak mempunyai pasangan. Dengan demikian pertumbuhan alamiah masih cukup terkendali.

# PEMBANGUNAN MANUSIA

# 4

## IPM DKI Jakarta Selalu Berada pada Posisi Teratas

Nilai IPM Provinsi DKI Jakarta Pada tahun 2016 adalah sebesar 79,60. Diantara 6 Kab/Kota se DKI Jakarta, IPM Kota Jakarta Selatan adalah yang teratas

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah tidak semata hanya dilihat dari angka pertumbuhan ekonomi saja, melainkan dari peningkatan kualitas manusianya yang diukur melalui angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kualitas penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan dari waktu ke waktu yang tercermin dari pertumbuhan IPM terutama pada kurun waktu 6 tahun terakhir. Pertumbuhan IPM tersebut menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta telah membuahkan hasil. Pada tahun 2016, IPM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai level 79,60 atau meningkat sebesar 0,77% dibandingkan tahun 2015. Peningkatan ini di atas rata-rata pertumbuhan IPM DKI Jakarta periode 2010 – 2016 yang mencapai 0,70% per tahun.

Angka IPM Provinsi DKI Jakarta selalu berada di posisi teratas diantara provinsi lainnya. Bahkan angka IPM DKI Jakarta berada jauh di atas IPM Nasional dengan selisih hampir 10 poin. Komponen pengeluaran menjadi variabel terbesar yang menjadikan IPM DKI Jakarta begitu superior dibandingkan provinsi lainnya. Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk DKI Jakarta selama tahun 2016 mencapai 17,5 juta rupiah, jauh di atas angka nasional yang hanya sebesar 10,4 juta rupiah.

Komponen terbesar kedua yang membuat IPM DKI Jakarta meningkat adalah angka rata-rata lama sekolah (RLS). Angka RLS DKI Jakarta tahun 2016 mencapai 10,88 tahun. Angka ini jauh di atas RLS nasional yaitu 7,95 tahun. Angka RLS DKI Jakarta merupakan yang tertinggi diantara 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Pada tahun 2016, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kab/Kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 69,52 (Kepulauan Seribu) hingga 83,94 (Jakarta Selatan). AHH tertinggi di Jakarta Timur (74,14 tahun). HLS tertinggi di Jakarta Selatan (13,22 tahun), dan RLS tertinggi di Jakarta Timur (11,52 tahun). Pengeluaran perkapita (d disesuaikan) tertinggi di Jakarta Selatan (22,9 juta rupiah per tahun)



### Pertumbuhan IPM Provinsi DKI Jakarta 2015-2016



Selama tahun 2015-2016, angka IPM Provinsi DKI Jakarta telah meningkat 0,61 poin. Angka IPM 2016 juga semakin mendekati nilai 80, yaitu batas nilai untuk kategori "IPM Sangat Tinggi".

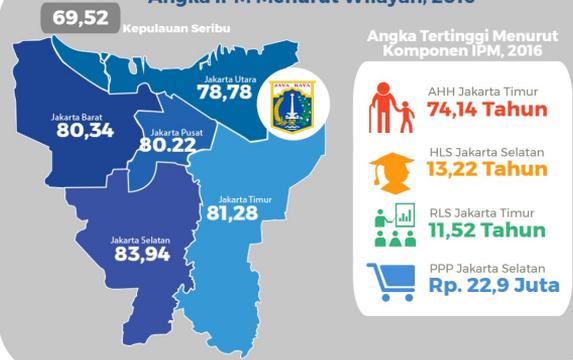
### Pertumbuhan IPM Per Komponen 2015-2016



**IPM + 0,61 poin (0,77%)**

IPM DKI Jakarta 2010-2016 rata-rata tumbuh 0,7% per tahun

### Angka IPM Menurut Wilayah, 2016



# 5

# KETENAGAKERJAAN

## UMP DKI Jakarta tahun 2017 mencapai Rp 3,36 Juta

*Naik sebesar 7,09 persen dari tahun sebelumnya, sekaligus menjadi kenaikan UMP DKI Jakarta yang paling lambat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya*

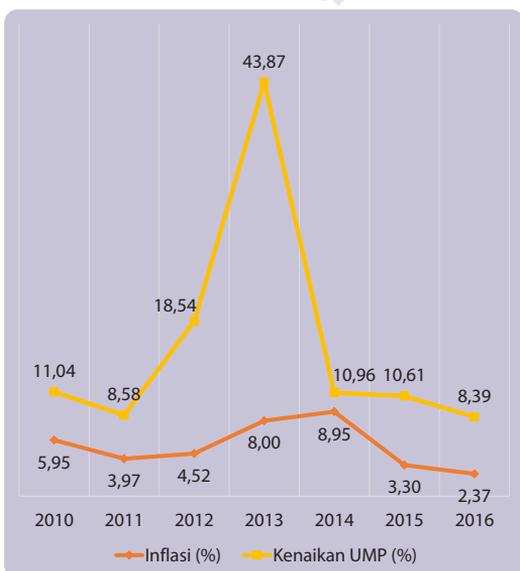
### Statistik Ketenagakerjaan DKI Jakarta, 2016-2017

Uraian	2016	2017
Penduduk Usia 15 thn + (000)	7 719,75	7 782,61
Angkatan Kerja (000)	5 310,77	5 461,87
Penduduk Bekerja (000)	5 004,55	5 169,16
Penganggur (000)	306,22	292,70
TPAK (%)	68,79	70,18
Tingkat Pengangguran (%)	5,77	5,36
Bekerja (%)	94,23	94,64
UMP (Rp. Juta)	3,10	3,36
Bekerja di Sektor Primer (%)	0,75	1,26
Bekerja di Sektor Sekunder (%)	16,38	13,30
Bekerja di Sektor Tersier (%)	82,87	85,44

Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Feb 2016 dan Feb 2017

**fyi.** “upah minimum di Jakarta naik lebih tiga kali lipat dalam enam tahun terakhir“

### Inflasi dan Kenaikan UMP DKI Jakarta Tahun 2010-2016 (persen)



Sumber: Jakarta Dalam Angka 2017

Profil ketenagakerjaan di Jakarta tidak jauh berbeda dengan pola-pola sebelumnya. Pada tahun 2017, jumlah angkatan kerja mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2016 yaitu sebesar 2,85 persen (Sakernas, Februari 2016-2017). Jumlah angkatan kerja pada tahun 2017 sebesar 5,5 juta jiwa, dimana 94,64 persen nya bekerja. Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya dan mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan ketersediaan lapangan pekerjaan. Sementara itu, angka pengangguran terus mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2017, jumlah pengangguran sebesar 293 ribu jiwa dengan tingkat pengangguran sebesar 5,36 persen.

Berdasarkan pendekatan tiga sektor utama (*Agriculture, Manufacture dan Services*), Sektor jasa-jasa atau tersier ini mendominasi penyerapan tenaga kerja di DKI Jakarta. Penyerapan tenaga kerja di sektor ini cenderung meningkat. Selama tahun 2016-2017, sektor tersier berhasil menyerap 85,44 persen penduduk yang bekerja. Dampaknya, penyerapan tenaga kerja di dua sektor lainnya menurun. Sektor *manufacture* (industri, konstruksi dan LGA) menyerap 13,30 persen dan sektor *agriculture* hanya mampu menyerap 1,26 persen penduduk yang bekerja. Berkembangnya Jakarta sebagai pusat perdagangan, bisnis, dan berbagai jenis jasa yang merupakan sektor *service* mampu menyerap tenaga kerja termasuk yang berasal dari luar Jakarta.

Di sisi lain, nilai upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta tidak pernah mengalami penurunan dan terus menunjukkan tren meningkat. Hal ini membuat DKI Jakarta semakin menjadi magnet bagi para pencari kerja. UMP DKI Jakarta tahun 2010 hanya sebesar Rp 1,12 juta kemudian meningkat tiga kali lipat menjadi Rp 3,36 juta pada tahun 2017. Peningkatan UMP tersebut ternyata sejalan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja serta peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di DKI Jakarta.

## Tingkat Pengangguran di DKI Jakarta Menunjukkan Tren Menurun

*Dalam kurun waktu lima tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka menurun dari 10,72% di tahun 2012 menjadi 5,36% di tahun 2017 (Sakernas, Februari 2017)*

Berdasarkan status pekerjaannya, kegiatan ketenagakerjaan dibedakan menjadi kegiatan sektor formal dan informal. Klasifikasi formal adalah mereka yang bekerja sebagai buruh/karyawan dan yang berusaha dibantu buruh tetap, sedangkan status lainnya masuk dalam klasifikasi informal. Dari tahun 2010-2016, persentase penduduk yang bekerja di sektor formal menunjukkan tren yang berfluktuasi. Dari 62,1 persen di tahun 2010, terus naik hingga tahun 2013 menjadi 73,6 persen, dan turun menjadi 68,7 persen di tahun 2017. Demikian halnya dengan kategori penduduk yang bekerja di sektor informal yang juga berfluktuasi, dari 37,9 persen di tahun 2010 dan menjadi 31,3 persen di tahun 2017. Di Provinsi DKI Jakarta kesempatan kerja di sektor formal dinilai lebih tinggi dibanding sektor informal karena banyaknya kegiatan usaha yang berlangsung secara formal kelembagaan seperti pada kantor-kantor dan badan usaha. Meningkatnya jumlah pekerja di sektor formal dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan status maupun kesejahteraan pekerja.

Pada tahun 2017, TPAK di Jakarta sebesar 70,18 persen, meningkat sebesar 1,38 poin dibandingkan dengan tahun 2016. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja yang benar-benar aktif secara ekonomi atau yang bekerja. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terus mengalami penurunan. TPT di DKI Jakarta tahun 2017 sebesar 5,36 persen, menurun dari tahun 2016. Dapat diartikan bahwa diantara 1000 orang penduduk DKI Jakarta terdapat sekitar 54 orang yang menganggur.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) dirinci menurut Kabupaten/Kota, tertinggi adalah di Jakarta Timur sebesar 9,13 persen kemudian diikuti oleh Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masing-masing sebesar 7,31 persen dan 6,51 persen. Terendah ada di Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu yang mayoritas penduduknya bekerja di sektor perikanan atau sektor primer. Data tersebut adalah hasil survei bulan Agustus tahun 2014 dan 2015 (catatan: Tahun 2016 tidak dilakukan survei, sehingga data tidak dapat ditampilkan).

**Penduduk DKI Jakarta yang Bekerja pada Sektor Formal dan Informal Tahun 2010-2017 (%)**

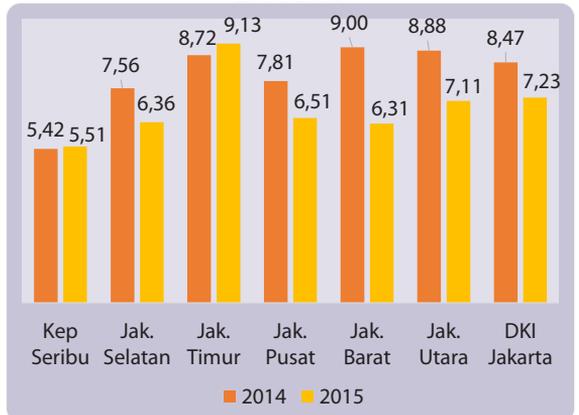


Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Feb 2010 dan Feb 2017

**fyi,**

“upah minimum ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak dengan mengacu pada 60 jenis barang/jasa yang sering dikonsumsi masyarakat”

**Tingkat Pengangguran Terbuka DKI Jakarta, 2014-2015**



Sumber: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) bulan Agustus 2014/2015.

# 6

## KESEHATAN

### Kesehatan Penduduk Jakarta Terus Membaik

Penduduk DKI Jakarta yang mengalami keluhan kesehatan tahun 2016 menurun yaitu sekitar kurang dari sepertiganya, dimana kaum hawa yang lebih banyak mengalami keluhan kesehatan

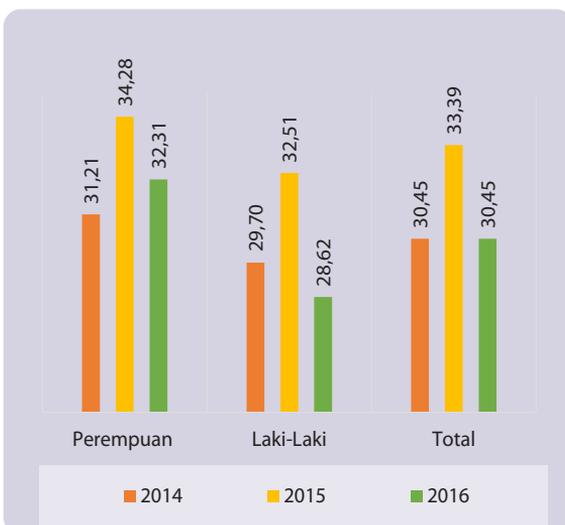
Indikator Kesehatan DKI Jakarta, 2014-2016

Uraian / Jenis Kelamin	2014	2015	2016
<b>Angka kematian bayi per 1000 kelahiran</b>			
Laki-laki	23,52	22,40	
Perempuan	14,14	13,70	
Laki-laki + Perempuan	18,90	18,10	
<b>Angka Harapan Hidup</b>			
Laki-laki	70,45	70,60	70,67
Perempuan	74,20	74,36	74,41
Laki-laki & Perempuan	72,27	72,43	72,49
% balita pernah diimunisasi	98,47	94,86	

Sumber: Hasil Proyeksi SP2010 dan Susenas 2014/16 & IPG 2016

**fyi,** “Imunisasi pernah dilakukan ke hampir seluruh balita di Jakarta. Hanya kurang dari 3 persennya saja yang belum tersentuh suntikan kekebalan tubuh tersebut“

Persentase Penduduk yang Memiliki Keluhan Kesehatan di DKI Jakarta



Sumber: Susenas 2014-2016

Kesehatan menjadi salah satu indikator yang penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan di suatu wilayah. Unsur ini menjadi salah satu pokok inti dalam penghitungan indeks pembangunan manusia (IPM). Pemprov DKI Jakarta telah mencanangkan keberhasilan di bidang kesehatan sebagai salah satu tujuan pembangunan wilayah, antara lain terciptanya kualitas hidup masyarakat secara adil dan merata. Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas hidup adalah tercapainya derajat kesehatan yang memadai. Indikator yang menunjukkan perbaikan kualitas kesehatan antara lain adalah penurunan angka kematian bayi, peningkatan angka harapan hidup serta persentase balita yang pernah diimunisasi.

Indikator kesehatan hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010 yaitu angka kematian bayi dan angka harapan hidup adalah angka indikator yang berlaku 5 tahunan mengikuti tahun sensus ataupun survei diantar sensus penduduk (SUPAS). Indikator kesehatan untuk angka kematian bayi berada pada kisaran 18 dari 1000 kelahiran. Pada tahun 2015, angka kematian bayi laki-laki sebesar 22,40 lebih tinggi dari kematian bayi perempuan sebesar 13,70. Tingginya angka kematian bayi laki-laki berimplikasi pada rendahnya rata-rata angka harapan hidup (AHH) laki-laki dibandingkan perempuan. AHH Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 mencapai 72,49 tahun. Artinya setiap bayi yang lahir akan mempunyai peluang hidup hingga umur 72-73 tahun.

Indikator lain untuk melihat derajat kesehatan penduduk adalah persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan. Selama tahun 2013-2015 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menunjukkan tren meningkat, namun pada tahun 2016 penduduk yang mengalami keluhan kesehatan turun menjadi 30,45 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa derajat kesehatan dan kepedulian penduduk DKI Jakarta terhadap kesehatan juga meningkat. Selain itu, fasilitas kesehatan juga semakin baik, apalagi saat ini sudah tidak dipungut biaya. Jika dilihat berdasarkan gender, penduduk perempuan lebih banyak yang mengalami keluhan kesehatan (32,31 persen)

## Kesadaran pemberian ASI pada bayi meningkat secara signifikan pada 2016

*Kesadaran masyarakat Jakarta terhadap kesehatan secara umum meningkat, Pemprov juga memfasilitasi rumah sakit tipe D di 18 kecamatan dan puskesmas di seluruh kelurahan secara gratis*

dibandingkan penduduk laki-laki (28,62 persen).

Pemprov DKI Jakarta terus mengembangkan pelayanan kesehatan prima bagi warganya antara lain menyediakan fasilitas kesehatan selevel rumah sakit yaitu rumah sakit tipe D di 18 kecamatan dan puskesmas di setiap kelurahan. Dengan demikian, dari warga dapat dengan mudah menjangkau fasilitas kesehatan dari segi lokasi. Dari segi biaya, warga juga dapat menikmati pelayanan secara gratis menggunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS mulai diterapkan di DKI Jakarta pada November 2012, pemegang KJS bisa berobat di seluruh Puskesmas dan 88 Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Pemprov DKI Jakarta).

Upaya lainnya adalah peningkatan penolong kelahiran oleh tenaga medis. Selama tahun 2013-2015, persentase persalinan yang ditangani tenaga medis semakin meningkat. Namun pada tahun 2016 menurun karena terdapat 1,19 persen yang ditolong oleh dukun. Hal ini mengindikasikan turunnya kesadaran masyarakat untuk mengurangi risiko kematian bayi dan ibu, serta mempercayakan proses kelahirannya kepada tenaga medis.

Hal yang juga sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) pada bayi. Pemberian ASI merupakan investasi kesehatan dimana anak yang diberi ASI mempunyai kekebalan tubuh yang lebih baik dibandingkan yang tidak diberi ASI. Upaya pemerintah dalam menyosialisasikan pentingnya ASI eksklusif mendapatkan respon positif. Pada tahun 2016, persentase balita di bawah dua tahun (umur 0-23 bulan) yang mendapat ASI minimal 6 bulan mencapai 64,72 persen, meningkat dibandingkan tahun lalu. Persentase bayi laki-laki yang mendapat ASI minimal 6 bulan lebih tinggi dibandingkan bayi perempuan. Peningkatan ini mengindikasikan meningkatnya edukasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberian ASI bukan hanya bagi kesehatan anak namun juga bagi si ibu pemberi ASI. Semakin banyaknya ruang laktasi di berbagai gedung perkantoran ikut membantu mendorong peningkatan statistik pemberian ASI terutama bagi ibu bekerja.

Penolong Kelahiran di DKI Jakarta

Penolong Kelahiran	2014	2015	2016
Dokter	41,97	46,18	42,26
Bidan	56,07	52,72	55,94
Paramedis	0,47	1,10	0,41
Dukun	1,01	-	1,18
Family	-	-	-
Lainnya	0,47	-	-

Sumber: Susenas 2014-2016



**fyi,** “manfaat pemberian ASI eksklusif sesuai dengan salah satu tujuan dari Millenium Development Goals (MDGs) yaitu mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu“

Foto: <http://health.dekiben.com>



Sumber: Statistik Kesejahteraan Provinsi DKI Jakarta 2016

# 7

## PENDIDIKAN

### Tingkat Pendidikan Penduduk DKI Jakarta Terus Membaik

Penduduk DKI Jakarta berpendidikan diploma ke atas sebanyak 15,05 persen dimana 10,91 persen nya mampu menyelesaikan pendidikan S1-S3, meningkat dibandingkan tahun 2015

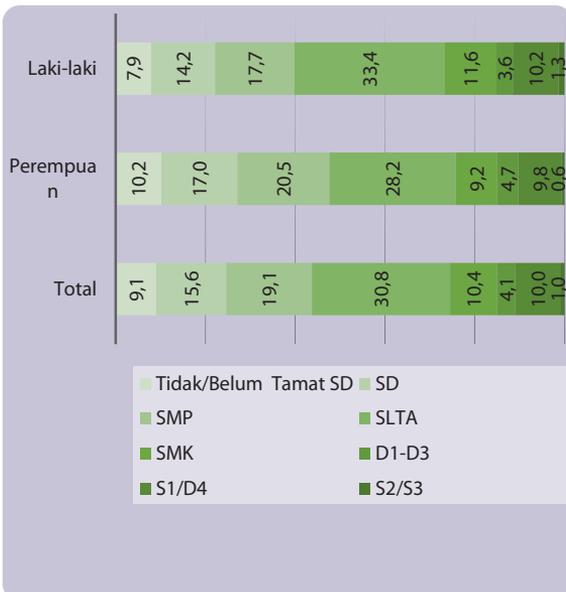
Indikator Pendidikan DKI Jakarta, 2014-2016

	2014	2015	2016
<b>Angka Buta Huruf</b>	%	%	%
Laki-laki	0,11	0,16	0,15
Perempuan	0,75	0,61	0,57
Total	0,43	0,39	0,36
<b>Rata-rata Lama Sekolah (tahun) usia 25 +</b>			
Total	10,54	10,70	10,88
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>			
7 - 12	99,46	99,56	99,61
13 - 15	96,68	97,19	97,47
16 - 18	70,23	70,73	70,83

Sumber: Susenas 2014-2016

**fyi,** “Jakarta Pintar (KJP) adalah kebijakan unggulan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah”

Persentase Penduduk Usia 10 tahun ke atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, DKI Jakarta, Tahun 2016



Sumber: Susenas 2016

Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta tidak akan lepas dari peraturan perundangan nasional yang lahir dari sistem politik. Kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah akan sangat memengaruhi proses serta output pendidikan. Dukungan yang besar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu dan kesejahteraan tenaga pendidikan serta bantuan operasional sekolah sangat dibutuhkan. Di samping itu Jakarta juga mempunyai program unggulan yaitu Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang diperuntukkan bagi siswa dari rumah tangga kurang mampu.

Rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 meningkat menjadi 10,88 yang artinya penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 11 tahun. Indikator pendidikan lainnya yaitu harapan lama sekolah yang mencapai angka 12,7. Hal ini mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah hingga D-1. Rapor tersebut merupakan pencapaian yang memuaskan.

Walaupun tergolong baik, namun masih terdapat sebanyak 0,36 persen penduduk yang buta huruf. Angka buta huruf penduduk perempuan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Demikian pula dengan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendidikan menurut gender. Pembangunan di bidang pendidikan ke depannya harus memperhatikan keseimbangan gender.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan perkembangan yang terus membaik untuk setiap kelompok umur. APS digunakan untuk mengetahui cakupan pelayanan pendidikan untuk setiap kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah anak kelompok usia tertentu yang sedang sekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Pada tahun 2016, APS 7-12 tahun mencapai 99,61 persen, APS 13-15 tahun sebesar 97,47 persen, dan APS 16-18 tahun sebesar 70,83 persen.

## Jumlah Fasilitas Sekolah terbanyak di Jakarta adalah pada jenjang SD

*Rasio murid per guru tingkat SMA tahun 2017 di DKI Jakarta sebesar 11:1, Jauh di atas syarat minimal dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 yang sebesar 20:1*

Pada tahun 2017, jumlah murid yang bersekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di DKI Jakarta (TK sampai dengan SLTA) mencapai 1,5 juta siswa. Lebih dari setengahnya adalah murid SD yang mencapai 779 ribu siswa. Diantara 1,5 juta siswa tersebut, sebagian besar bersekolah pada sekolah negeri yaitu sebanyak 57,6 persen. Sementara sisanya yaitu 42,4 persen mengenyam pendidikan pada sekolah swasta.

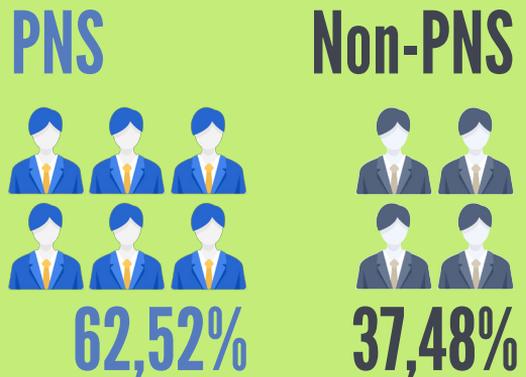
Indikator yang dapat menggambarkan ketersediaan dan kelayakan sarana pendidikan antara lain rasio murid-guru. Rasio murid-guru menggambarkan beban seorang tenaga pendidik dalam mengajar beberapa orang murid. Beban yang semakin besar menggambarkan kurangnya jumlah tenaga pendidik yang berdampak pada ketidakefektifan proses belajar mengajar. Menurut data dari Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta, pada Tahun 2017, tercatat rasio murid-guru secara total adalah sebesar 1:14 yang artinya setiap satu guru di Jakarta mengajar sekitar 14 orang siswa. Angka ini sekaligus mengindikasikan bahwa ketersediaan atau kecukupan jumlah tenaga pendidik di DKI Jakarta cukup baik. Rasio murid-guru paling banyak ada pada jenjang pendidikan Sekolah Luar Biasa yaitu 1:4 atau satu orang guru mengajar sekitar 4 siswa SLB. Sementara, yang paling kecil rasionya adalah pada jenjang SD yaitu sebesar 1:19. Bila dibedakan menurut status pengelolaan sekolah, maka sekolah swasta memiliki rasio yang lebih baik yaitu 1 guru mendampingi 11 orang siswa.

Jumlah guru yang mengajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2017 di DKI Jakarta mencapai 105 ribu orang dimana 44 persennya mengajar di sekolah negeri. Status kepegawaian guru-guru di sekolah negeri didominasi oleh PNS yaitu sebesar 62,52 persen. Namun angka tersebut juga bermakna bahwa masih banyak guru-guru di sekolah negeri yang belum berstatus PNS. Sedangkan menurut data dari Dinas Pendidikan, hampir 3 persen guru yang mengajar di sekolah swasta ternyata berstatus PNS.

### Rasio Guru dan Murid pada Semua jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di DKI Jakarta, 2017



### Perbandingan Guru di Sekolah Negeri Menurut Status Kepegawaian di DKI Jakarta, 2017



Sumber: Website Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta (diunduh pada tanggal 20 September 2017)

## Hampir Seluruh Rumah di Jakarta Memiliki Lantai Selain Tanah

*Rumahtangga yang mengonsumsi air minum leding/kemasan dan penerangan listrik selalu mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir*

### Indikator Perumahan di DKI Jakarta

Karakteristik	2014	2015	2016
Lantai selain tanah	99,76	99,86	99,78
Dinding (tembok)	92,12	93,71	95,76
Atap (kayu/sirap, beton, genteng)	44,41	44,18	42,52
Fasilitas penerangan (listrik)	99,94	99,94	99,45
Fasilitas air minum (leding/kemasan)	84,84	84,98	85,22
Jamban (milik sendiri)	79,19	80,53	81,41
Tempat pembuangan akhir tinja (tangki septik)	93,13	93,14	97,99

Sumber: Susenas 2014-2016



**fyi,**

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menyediakan tempat tinggal layak huni khususnya bagi warga ibukota yang tinggal di area pemukiman kumuh dan area sekitar waduk/situ/sungai yang menjadi daerah langganan banjir tahunan”

### Rumah Susun Sederhana Menurut Kota, 2016

Kota Adm.	Jumlah Lokasi	Jumlah Blok	Luas Area (Ha)	Jumlah Unit
Jakarta Selatan	3	7	2,35	520
Jakarta Timur	18	79	52,59	6 592
Jakarta Pusat	10	32	24,13	7 586
Jakarta Barat	7	79	18,98	4 522
Jakarta Utara	11	107	49,61	7 472
DKI Jakarta	49	304	147,65	26 692

Sumber: Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Provinsi DKI Jakarta

Indikator perumahan di DKI Jakarta menunjukkan angka yang cukup baik. Pada tahun 2016, tercatat sebanyak 99,77 persen rumah menggunakan jenis lantai selain tanah (granit, keramik, vinil, tegel, kayu, semen), meskipun mengalami penurunan 0,09 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, tercatat sebanyak 95,76 persen rumah dengan dinding tembok dan sebanyak 41,20 persen rumah dengan atap genteng. Hal ini mengindikasikan semakin baiknya kondisi perumahan di Jakarta sebagai hunian yang layak. Semakin sadarnya masyarakat terhadap fasilitas perumahan juga terlihat dari terus meningkatnya rumah yang memiliki fasilitas jamban milik sendiri.

Hampir seluruh rumahtangga di Jakarta menggunakan fasilitas penerangan listrik di rumahnya yaitu mencapai 99,90 persen. Angka ini menunjukkan bahwa seluruh daerah di DKI Jakarta sudah memiliki keterjangkauan listrik dari pemerintah. Buruknya kondisi maupun kualitas air tanah di Jakarta membuat semakin banyaknya rumahtangga yang mengonsumsi air leding (meteran maupun eceran), air isi ulang, maupun air kemasan bermerek sebagai sumber air minum. Tercatat sebanyak 85,21 persen konsumen air leding/kemasan pada tahun 2016.

Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menyediakan tempat tinggal layak huni bagi warga ibukota adalah dengan pembangunan rumah susun (rusun) khususnya kepada warga yang tinggal di permukiman kumuh dan sekitar bantaran sungai/waduk yang menjadi daerah rawan banjir. Menurut data dari dinas terkait, Rumah Susun Sederhana (rusun) di DKI Jakarta tersebar di 5 Kotamadya di DKI Jakarta dengan jumlah lokasi mencapai 49 titik lokasi. Secara total, rusun-rusun tersebut terbentang pada hamparan seluas 147 hektar lebih yang terdiri dari 304 blok dengan jumlah unit mencapai hampir 27 ribu unit. Ketersediaan rusun tersebut diharapkan mampu membuat kehidupan masyarakat Jakarta yang lebih layak dengan fasilitas yang jauh lebih baik dibanding tinggal di area kumuh.

## Garis Kemiskinan di DKI Jakarta Meningkat

*Jumlah penduduk miskin di Jakarta pada Maret 2017 adalah 389,68 ribu orang atau sebesar 3,77 persen, meningkat dibandingkan Maret 2016*

Peningkatan angka Garis Kemiskinan berdampak pada naiknya persentase penduduk miskin di DKI Jakarta. GK merupakan batas pengelompokan penduduk miskin (di bawah GK) atau tidak miskin (di atas GK). Kelompok miskin pun juga terbagi menjadi beberapa kelompok lagi dalam analisis yang lebih dalam. Tercatat GK DKI Jakarta pada Maret 2017 sebesar Rp. 536 ribu per kapita per bulan, lebih tinggi dibandingkan GK pada Maret 2016 sebesar Rp. 510 ribu per kapita per bulan. Peningkatan GK sebesar Rp. 26 ribu ini menambah jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta sebanyak 5,39 ribu orang. Peningkatan penduduk miskin sebesar ini

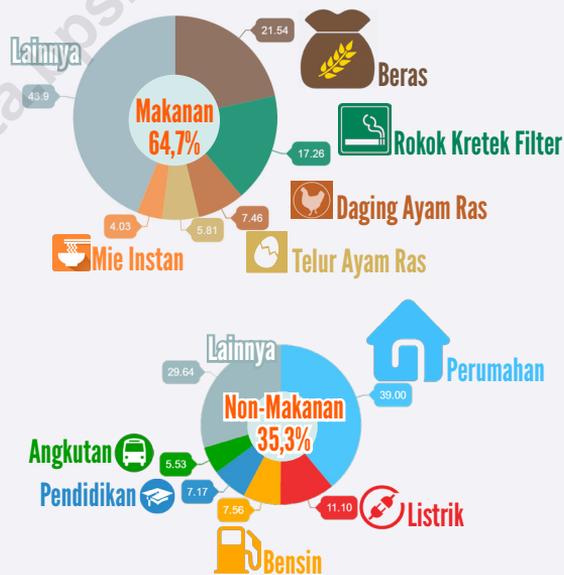
Peranan kelompok makanan dalam menciptakan GK di Jakarta lebih besar dibandingkan komoditi non-makanan (perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan). GK makanan menyumbang sebesar 64,7 persen dimana komoditi beras, rokok kretek filter, daging ayam ras, dan telur ayam ras menyumbang peranan terbesar. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan makanan pokok tersebut. Sedangkan GK non-makanan menyumbang sebesar 35,3 persen dari total GK DKI Jakarta yang didominasi oleh komoditi perumahan. Untuk itu, dinas terkait berkewajiban menciptakan dan mengelola hunian perumahan yang baik untuk warga ibukota.

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin, tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga merupakan unsur lain yang harus diperhatikan. Indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,488 meningkat 0,031 poin dibandingkan Maret 2016. Sedangkan indeks keparahan meningkat sebesar 0,014 poin yaitu sebesar 0,097 pada Maret 2017. Penanggulangan kemiskinan seharusnya juga harus dapat mengurangi kedua masalah tersebut.

### Tingkat Kemiskinan di DKI Jakarta, Maret 2017



### Komoditi Pemberi Sumbangan Terbesar Terhadap Garis Kemiskinan, Maret 2017 - Makanan & Non-Makanan



### Indikator Kemiskinan Provinsi DKI Jakarta, 2014-2017

Uraian	2014	2015	2016	2017
Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)	393,90	398,92	384,30	389,69
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,92	3,93	3,75	3,77
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/ bulan)	447 797	487 388	510 359	536 546
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,387	0,517	0,457	0,488
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,069	0,104	0,083	0,097

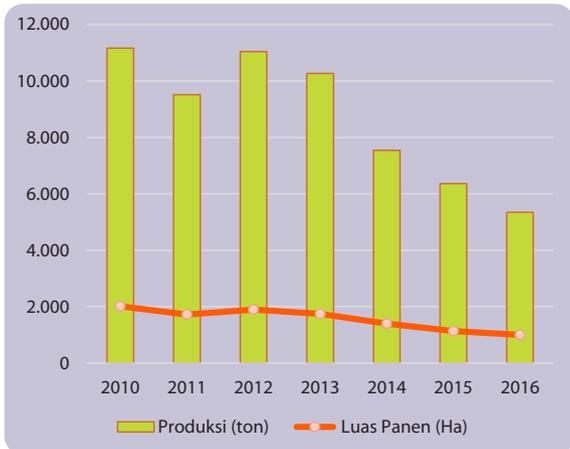
Sumber: Susenas Bulan Maret, 2014 - 2017

# 10 PERTANIAN

## Luas Lahan di Jakarta Terus Mengalami Penurunan

Produktifitas petani padi di DKI Jakarta tahun 2016, rata-rata sebesar 5,3 Ton padi per Hektar. Perolehan yang hampir sama dengan yang di tahun 2014

### Luas Panen dan Total Produksi Padi Sawah, 2010-2016



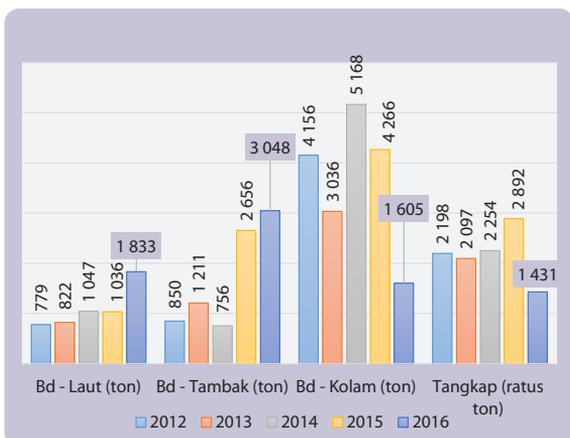
Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017



**fyi,** “Tanaman hias adalah salah satu produk pertanian unggulan DKI Jakarta”

Foto “Taman Anggrek Indonesia Permai” <http://tamananggrektaip.blogspot.com>

### Produksi Perikanan Tangkap dan Perikanan Budi-daya, Tahun 2012 - 2016



Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017

Kontribusi sektor *agriculture* di DKI Jakarta sangatlah kecil dibandingkan sektor lainnya. Tercatat pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan ini hanya sebesar 0,09 persen dengan nilai tambah sebesar Rp 1,99 triliun. Walaupun memiliki sumbangsih yang cukup kecil, sektor ini tetap menjadi potensi besar. Salah satunya adalah *urban farming* (pertanian perkotaan) yang mampu menciptakan lingkungan hijau untuk keseimbangan ekosistem lingkungan. Kegiatan tersebut utamanya pada subsektor tanaman pangan.

DKI Jakarta sebagai kota metropolitan, ternyata di sekitar gedung pencakar langitnya masih dapat dijumpai lahan pertanian yang ditanami tanaman pangan berupa Padi. Sepanjang tahun 2016, dengan luas panen padi sebesar 1.002Ha dapat dihasilkan sebanyak 5.432 ton. Dengan jumlah produksi padi sebesar ini tentu saja tidak akan cukup memenuhi *demand* masyarakat DKI Jakarta. Pemenuhan kebutuhan makanan pokok tersebut sebagian besar dipenuhi dengan cara impor dari luar Jakarta. Meskipun tampaknya terjadi penurunan produksi padi, namun produktifitasnya masih di atas 5,3 ton padi per hektar. Produktifitas tersebut menyamai dengan yang terjadi di tahun 2014.

Selain subsektor pertanian tanaman pangan, di DKI Jakarta juga memiliki potensi pada subsektor perikanan Jakarta. Pada tahun 2016, tercatat produksi perikanan budidaya laut di DKI Jakarta mencapai 183.346 ton. Angka ini mengalami peningkatan tajam sebesar hampir 80 ribu ton dibanding tahun sebelumnya. Berbeda dengan perikanan budidaya laut, perikanan tangkap justru mengalami penurunan dalam produksinya. Tercatat produksi perikanan tangkap tahun 2016 hanya sebesar 143 ribu ton. Angka ini hanya setengahnya bila dibandingkan produksi tahun 2015. Walaupun mengalami penurunan, namun nilai produksinya mendominasi dan memiliki sumbangsih tertinggi. Perikanan tangkap menyumbang 96,59 persen terhadap nilai produksi perikanan.

# ENERGI & AIR BERSIH

# 11

## Produksi Listrik PLN yang Disalurkan serta Jumlah Pelanggan Terus Meningkat

Mayoritas pelanggan PLN merupakan rumah tangga dimana sekitar 90 persen pelanggan rumah tangga menggunakan listrik bertegangan 300-150 VA

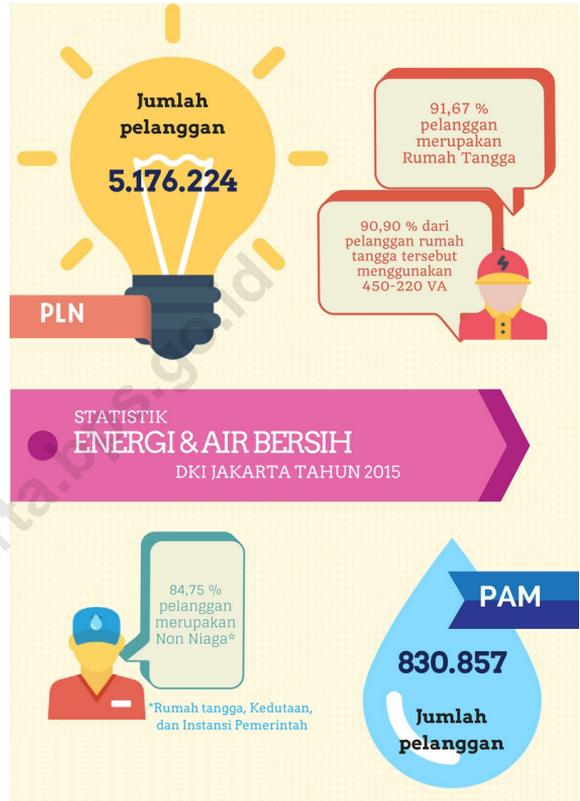
Jakarta adalah kota yang tidak pernah ada tidurnya. Ungkapan tersebut mungkin pernah atau kerap terdengar. Banyaknya gedung perkantoran, apartemen, dan berbagai bangunan lainnya yang membutuhkan listrik baik untuk penerangan maupun sumber energi berbagai peralatan elektronik membuat kebutuhan dan konsumsi listrik di Jakarta sangat tinggi. Setiap tahunnya terjadi peningkatan produksi maupun listrik terjual melalui PT PLN untuk area DKI Jakarta. Jumlah pelanggan listrik di Jakarta mencapai 5.176.224 orang.

Dari total pelanggan PLN area DKI Jakarta yang berjumlah 5 juta lebih tersebut, 91 persennya adalah pelanggan rumah tangga. Sementara sisanya yaitu sekitar 9 persen adalah pelanggan untuk Bisnis dan Sosial. Diantara pelanggan rumah tangga, sekitar 90 persennya adalah pelanggan yang menggunakan listrik PLN dengan daya di bawah 450 s.d 2200 VA. Sisanya adalah pelanggan yang menggunakan daya di atas 2200 VA.

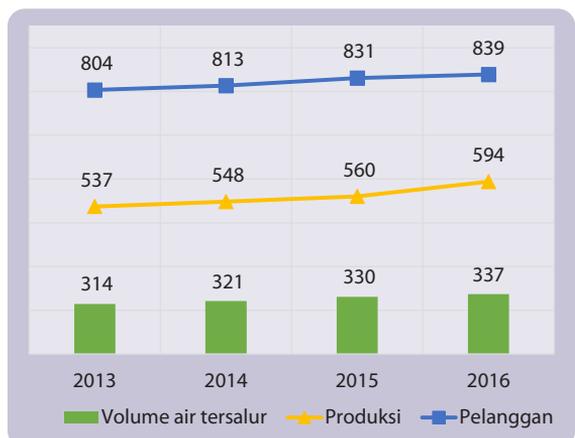
Kondisi dan kualitas air tanah di Jakarta yang kurang baik menyebabkan kebutuhan air bersih di Jakarta masih bergantung dari luar daerah Jakarta. Sumber air bersih di Jakarta diantaranya berasal dari waduk Jatiluhur dan PDAM Tangerang, sementara Kali Krukut menyumbang sangat kecil kebutuhan air bersih Jakarta. Sumber ini harus dijaga dan dipelihara agar tidak terjadi deficit air bersih.

Produksi air bersih di Jakarta pada tahun 2016 mencapai 594 juta m<sup>3</sup> atau naik 6 persen dari 560 juta m<sup>3</sup> di tahun sebelumnya. Peningkatan produksi air bersih ini masih di atas peningkatan jumlah pelanggan yang tumbuh tidak sampai 1 persen dari 831 ribu pelanggan menjadi 839 ribu atau ada tambahan 8 ribu pelanggan baru sepanjang tahun 2016. Masalah kebocoran pipa serta jebolnya pintu air masih menjadi tantangan utama operator air bersih disamping bahan baku air bersih yang terbatas.

### Indikator Listrik di DKI Jakarta



### Jumlah Pelanggan, Produksi dan Volume Tersalur Air Bersih DKI Jakarta, Tahun 2013-2016



Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017

# 12

## INDUSTRI PENGOLAHAN

### Industri Manufaktur Besar dan Sedang Jakarta Tumbuh Jauh di Atas Nasional

Jenis industri yang mengalami pertumbuhan positif cukup tinggi adalah industri logam dasar, industri pakaian jadi, industri tekstil, dan industri barang galian bukan logam (Tw.2-2017)

Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan, Tenaga Kerja, Nilai Tambah di DKI Jakarta, 2013 - 2015

KETERANGAN	2013	2014	2015
Industri Pengolahan (perusahaan)	1 242	1 240	1 323
Tenaga Kerja (orang)	275 954	277 757	278 102
Nilai Tambah (milyar Rp.)	133 383	128 454	164 809

Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017

**fyi,** “*E-smart* IKM merupakan sistem yang mengintegrasikan berbagai *marketplace* yang sudah ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi perluasan pasar IKM melalui promosi *online*”



Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017

Andil sektor Industri pengolahan dalam perekonomian DKI Jakarta pada triwulan 2-2017 mencapai 13,56 persen, menempati urutan kedua dalam perekonomian di ibukota setelah sektor perdagangan. Kontribusi sektor tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun. Berkembangnya daerah-daerah satelit Jakarta seperti Tangerang, Bekasi dan Kerawang mengakibatkan Jakarta tidak lagi menjadi sentra industri. Wilayah yang lebih luas serta ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak dan murah menjadikan kawasan penyangga tersebut menjadi sentra kawasan industri. Diketahui bahwa nilai UMP DKI Jakarta terus mengalami peningkatan sehingga banyak pengusaha yang memindahkan lokasi pabriknya ke daerah satelit tersebut.

Industri manufaktur terbagi menjadi industri manufaktur besar dan sedang (IBS) dan industri manufaktur mikro dan kecil (IMK). IBS dan IMK Jakarta selalu tumbuh di atas angka nasional. tercatat pada Tw.2-2017 IBS sebesar 11,29 (lebih tinggi 7,29 poin dari IBS nasional) dan IMK sebesar 18,48 (lebih tinggi 15,98 poin dari IMK nasional). Hal ini mengindikasikan bahwa industri pengolahan merupakan sektor perekonomian yang signifikan. Pemerintah dan masyarakat harus bersinergi untuk menciptakan kemajuan dalam sektor tersebut.

Dalam sektor IMK, industri dengan nilai produksi tertinggi pada triwulan 2-2017 antara lain industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), dan barang anyaman dari bambu rotan dan sejenisnya sebesar 61,58 persen; industri furnitur sebesar 51,74 persen; industri peralatan listrik sebesar 35,95 persen; serta industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 27,94 persen.

Kemenperin sebagai lembaga pemerintah yang membina IMK telah meluncurkan suatu program yaitu *e-smart* sebagai sistem *database* yang tersaji dalam profil industri, sentra, dan produk. Program ini mengusung 9 komoditas unggulan yang akan dikembangkan di *marketplace* yaitu kosmetik, *fashion*, makanan, minuman, kerajinan, perhiasan, *furniture*, herbal dan produk logam.

## Nilai Konstruksi yang Diselesaikan serta Pendapatan Sektor Konstruksi Terus Mengalami Peningkatan Sejalan dengan Maraknya Pembangunan

Kontribusi konstruksi dalam ekonomi Jakarta cukup besar yaitu kisaran 12-13 persen

Konstruksi menempati urutan ketiga kontributor terbesar perekonomian DKI Jakarta sehingga menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang kegiatan ekonomi. Maraknya pembangunan infrastruktur dengan skala besar yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi juga yang dilakukan oleh pemerintah pusat adalah alasan sektor konstruksi terus mengalami peningkatan. Pembangunan seperti MRT, LRT, jalan toll, sodetan kali, *bypass-underpass*, dll mengakibatkan pengeluaran dan pendapatan konstruksi meningkat. Pada tahun 2015, nilai konstruksi yang diselesaikan meningkat 11,88 persen atau sebesar 162,7 triliun rupiah dimana sebesar 42,56 persennya merupakan jenis bangunan sipil (*building and civil engineering*).

Penambahan dan percepatan pembangunan infrastruktur di ibu kota berhasil diperoleh pendapatan bruto perusahaan konstruksi mencapai 196 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut, seluruh komponen biaya-biaya (biaya antara) yang dikeluarkan juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan konstruksi mencapai 102 triliun rupiah. Ini artinya nilai pendapatan bruto mencapai 1,9 kali lipat nilai pengeluarannya.

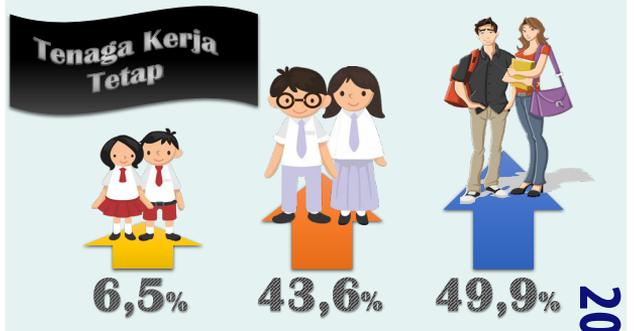
Pertumbuhan konstruksi yang terjadi juga berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2015, sektor ini berhasil menyerap tenaga kerja lepas di bidang konstruksi sebanyak 288 juta orang, meningkat dibandingkan tahun lalu (sekitar 267 juta orang). Sementara bidang pekerjaan konstruksi terbanyak adalah pekerja bidang konstruksi bangunan sipil sebanyak 127 juta orang. Sementara untuk tenaga kerja tetap di perusahaan konstruksi, sektor ini lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan pendidikan yang cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya tenaga kerja tetap dengan pendidikan SLTA mencapai 43,64 persen dan yang berhasil mengenyam pendidikan perguruan tinggi mencapai 49,87 persen. Hal ini mengindikasikan tenaga kerja di bidang konstruksi membutuhkan keahlian dan keprofesionalan.

Sumber Dana Nilai Konstruksi di DKI Jakarta, 2014



fyi,

“Sepanjang tahun 2016, terdapat 1.933 rumah dibangun di Jakarta oleh Perum Perumnas Jabodetabek”



44% pekerja harian lepas adalah pekerja konstruksi bangunan sipil



2015

## Tahun 2016 Jumlah Wisatawan Asing ke Jakarta Meningkat 5,7%

Pada tahun 2016 ada sebanyak 2,5 juta wisatawan manca negara yang berkunjung ke DKI Jakarta dengan melalui tiga pintu masuk utama.

### Jumlah Wisman dan Pengunjung Obyek Wisata Unggulan DKI Jakarta, 2014 - 2016

Uraian	2014	2015	2016
<b>Jumlah Wisatawan Manca Negara:</b>			
Sukarno Hatta	2 246 437	2 304 275	2 445 275
Tanjung Priok	64 941	64 611	60 322
Halim PK	7 917	8 340	6 408
<b>Total</b>	<b>2 319 295</b>	<b>2 377 226</b>	<b>2 512 005</b>
<b>Jumlah Kunjungan Wistawan ke Obyek Wisata Unggulan:</b>			
Ancol	16 085 604	16 661 517	17 850 284
TMI	4 587 735	5 575 905	4 977 704
Ragunan	4 100 570	5 157 035	5 177 877
Monas	1 156 208	1 539 195	1 878 155
Lainnya	531 816	914 687	1 196 050
<b>Total</b>	<b>26 461 933</b>	<b>29 848 339</b>	<b>31 080 070</b>

Sumber: Jakarta Dalam Angka, 2017

**fyi,**

“Bandar udara internasional Soekarno-Hatta mendapatkan penghargaan *The World's Most Improved Airport 2017* dari Skytrax“

### Statistik Hotel DKI Jakarta, 2014 - 2016

Uraian	2014	2015	2016
<b>Akomodasi</b>			
Hotel Bintang	213	228	232
Hotel Non Bintang	194	212	205
<b>Total Hotel</b>	<b>407</b>	<b>440</b>	<b>437</b>
<b>Jumlah Kamar</b>			
Hotel Bintang	36 552	39 786	39 806
Hotel Non Bintang	7 975	8 652	8 298
<b>Total Hotel</b>	<b>44 527</b>	<b>48 438</b>	<b>48 104</b>
<b>Jumlah Tempat Tidur</b>			
Hotel Bintang	51 577	53 999	55 293
Hotel Non Bintang	10 520	11 049	10 991
<b>Total Hotel</b>	<b>62 097</b>	<b>65 048</b>	<b>66 284</b>
<b>Rata-rata Tingkat Hunian Kamar</b>			
Hotel Bintang	62,42	60,27	61,17
Hotel Non Bintang	62,61	81,44	68,60
<b>Total</b>	<b>53,79</b>	<b>63,49</b>	<b>62,28</b>
<b>Rata-rata Lama Menginap</b>			
Hotel Bintang	2,01	1,97	1,87
Hotel Non Bintang	1,47	1,45	1,43

Sumber: Statistik Hotel dan Tingkat Penghunian Kamar Hotel DKI Jakarta, 2014 - 2016

Slogan “Enjoy Jakarta” adalah pesan bahwa Jakarta pantas sebagai destinasi wisata dan budaya favorit bagi wisatawan baik domestik atau non domestik. Jakarta menawarkan lokasi hiburan serta rekreasi terbaik, mulai dari Taman Impian Jaya Ancol dengan berbagai aktivitas menarik, Taman Mini Indonesia Indah yang menampilkan keragaman budaya Indonesia, serta Kebun Binatang Ragunan dengan kekayaan satwa di dalamnya.

Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Jakarta pada tahun 2016 meningkat sebesar 5,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana sebagian besar masuk melalui Bandara International Soekarno-Hatta.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek wisata unggulan obyek wisata unggulan di DKI Jakarta di tahun 2016 mencapai 31 juta kunjungan atau mengalami peningkatan sebesar 4 persen. Objek wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Taman Impian Jaya Ancol dengan jumlah kunjungan mencapai hampir 18 juta pelancong selama tahun 2016 atau mencapai 57 persen dari total kunjungan wisata di DKI Jakarta. Obyek wisata Museum seperti Museum Sejarah Jakarta mengalami peningkatan kunjungan yang cukup tinggi.

Seiring dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jakarta, jumlah akomodasi juga meningkat, khususnya Hotel Berbintang. Jumlah Hotel Berbintang di DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 232 atau tumbuh 2 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah hotel dapat dikatakan sebagai langkah antisipasi pengusaha di bidang perhotelan menghadapi lonjakan permintaan pasar. Berdasarkan hasil Survey Hotel yang dilakukan oleh BPS Provinsi DKI Jakarta, sepanjang tahun 2016, rata-rata tingkat hunian kamar hotel berbintang meningkat 90 basis point, yaitu dari 60,27 persen di tahun 2015 menjadi 61,17 persen. Sementara rata-rata lama hari tamu menginap pada tahun 2016 ada kecenderungan menurun.

## Rasio Jalan terhadap jumlah kendaraan terus mengecil

*Di tahun 2016 jumlah kendaraan mobil berpenumpang meningkat hampir 2 persen. Dari 4 kendaraan ber-plat B yang melintasi jalan di Jakarta, 3 diantaranya adalah Sepeda Motor*

Transportasi merupakan tulang punggung kegiatan ekonomi yang sangat berperan penting di Jakarta. Namun pelayanan angkutan umum yang memadai dan mampu memenuhi harapan masyarakat masih belum sepenuhnya dapat terwujud. Kemacetan lalu lintas masih menjadi permasalahan utama transportasi di Jakarta. Berbagai upaya yang telah dilakukan pemprov antara lain mempercepat pembangunan angkutan masal, membangun fly-over dan under-pass, penyesuaian jam masuk sekolah dan jam kerja, peningkatan sarana lalu lintas, jalur three-in-one dan sanksi bagi parkir liar.

Namun pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak berimbang dengan peningkatan jumlah kendaraan yang melintasi jalanan ibukota, karena terbatasnya ruang. Dalam kurun waktu 2015-2017 panjang jalan yang ada belum mampu mengimbangi jumlah kendaraan yang melaluinya. Pada tahun 2016 terjadi penurunan sedikit pada moda transportasi sepeda motor dan mobil bis umum. Namun pada kendaraan roda empat terus menunjukkan peningkatan volume.

Alat transportasi masal Bus Trans Jakarta (melalui Busway) adalah salah satu layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah DKI Jakarta bagi warganya. Selama tahun 2016 jumlah bis bertambah menjadi 910 unit yang melayani 123 juta lebih penumpang. Jumlah penumpang Bis Trans Jakarta tahun 2016 meningkat sebesar 20 persen dibandingkan tahun 2015 yang disebabkan oleh peningkatan penambahan rute dan jumlah Bus Trans Jakarta.

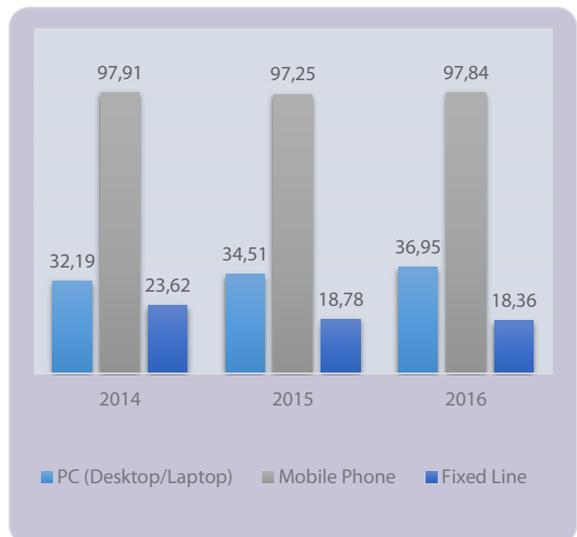
Akses penduduk Jakarta terhadap teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang cukup signifikan terutama untuk kepemilikan personal komputer atau laptop. Di tahun 2014 rumahtangga yang memiliki pc/laptop sebanyak 32,19 persen meningkat menjadi 36,95 persen di tahun 2016. Sementara kepemilikan telepon seluler tergolong sangat tinggi, yaitu berkisar 97 persen. Sementara, kepemilikan telepon rumah menunjukkan grafik yang terus menurun.

Statistik Transportasi DKI Jakarta, 2014-2016

Uraian	2014	2015	2016
<b>Panjang Jalan (meter)</b>			
Tol	123 731	123 731	138 689
Negara	152 516	152 516	152 516
Provinsi	6 681 446	6 681 446	6 681 446
Total	6 957 693	6 957 693	6 972 651
<b>Jumlah Kendaraan Bermotor</b>			
Sepeda Motor	13 084 372	13 989 590	13 310 672
Mobil Penumpang	3 266 009	3 469 168	3 525 925
Mobil Beban	673 661	706 014	689 561
Mobil Bis	362 066	363 483	338 730
Kend khusus	137 859	139 801	141 516
Total	17 523 967	18 668 056	18 006 404
<b>Angkutan Umum Masal Trans Jakarta (Busway)</b>			
Jumlah Bus	669	502	910
Penumpang	111 630 305	102 950 384	123 706 856
Pendapatan (Milyar Rp)	365,65	334,77	397,04

Sumber: Jakarta dalam Angka, 2015-2017

## Persentase Rumahtangga Pemilik Telepon, Telepon Seluler, dan Personal Computer/ Desktop/Notebook di DKI Jakarta



Sumber: Jakarta dalam Angka, 2016

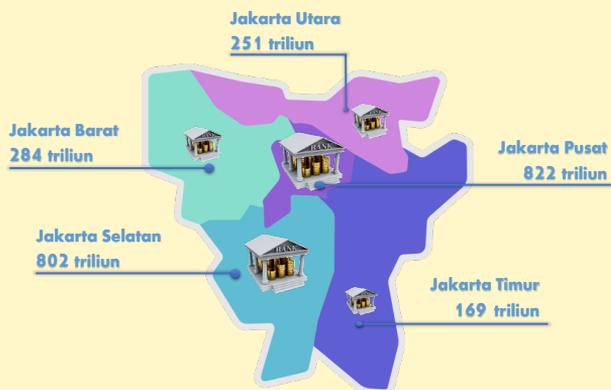
# 16

## PERBANKAN & INVESTASI

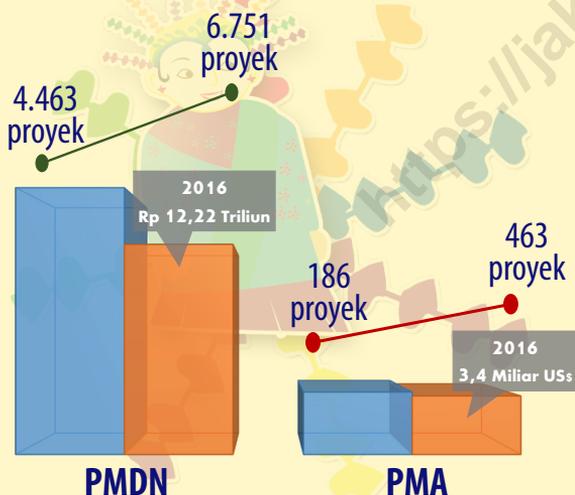
Terdapat 68 Bank dengan 4.468 Kantor Bank di Jakarta pada Tahun 2016

Jumlah tersebut merupakan total dari jenis bank umum devisa (69,12 persen), bank umum bukan devisa (20,59 persen), dan bank syariah (10,29 persen)

Posisi Penghimpunan Dana Rupiah dan Valas Melalui Bank Umum, 2016



Jumlah Proyek dan Nilai Investasi PMDN & PMA, 2015-2016



Sumber: Jakarta Dalam Angka 2017



BANK INDONESIA

fyi,

“Pada Agustus 2017, BI menurunkan tingkat suku bunga BI 7-day (Reverse) Repo Rate dalam rangka mendorong optimisme masyarakat”

Ekonomi DKI Jakarta hingga triwulan 2-2017 mengindikasikan adanya fase meningkat melalui pertumbuhan investasi dan tingginya konsumsi rumah tangga. Selain itu, inflasi DKI Jakarta juga masih tetap terkendali dan diharapkan mampu mendukung momentum pertumbuhan. Untuk turut mendukung momentum pemulihan ekonomi tersebut secara nasional dan tetap mengutamakan kestabilan makro ekonomi dan sistem keuangan, BI menurunkan tingkat suku bunga BI 7-day Reverse Repo Rate. Kebijakan tersebut konsisten dengan adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter dengan rendahnya realisasi dan prakiraan inflasi tahun 2017 dan 2018 di dalam kisaran sasaran. Diharapkan hal tersebut dapat mendorong optimisme masyarakat sehingga perekonomian khususnya DKI Jakarta terus menguat dan berkualitas. (Sumber: Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Agustus 2017, Bank Indonesia).

Posisi dana simpanan bank pada akhir tahun 2016 mencapai 2.386 triliun rupiah, meningkat dari tahun 2015 yang sebesar 2.090 triliun rupiah. Jenis simpanan yang banyak diminati adalah simpanan berjangka hingga mencapai 53 persennya, kemudian giro (29 persen) dan tabungan (18 persen). Peningkatan juga terjadi pada kredit yang diberikan yaitu mencapai 1.407 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan masih adanya optimisme masyarakat terkait kondisi keuangannya.

Meskipun perekonomian global masih belum pulih, Jakarta sendiri masih mempunyai potensi yang menarik minat investor untuk berinvestasi. Pada tahun 2016, tercatat terjadi peningkatan jumlah proyek yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di Jakarta. Namun, nilai investasinya mengalami penurunan. Terdapat 493 proyek PMDN dengan nilai investasi sekitar 12 triliun rupiah dari sebelumnya 186 proyek senilai 15 triliun rupiah pada tahun 2015. Sedangkan PMA memiliki 6.751 proyek senilai 3,4 miliar USD dari sebelumnya 4.463 proyek senilai 3,6 miliar USD pada tahun 2015. Peningkatan investasi di ibukota diharapkan dapat menjadi penopang pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta sehingga tidak bergantung pada konsumsi.

## Beberapa Tahun Terakhir Inflasi di Provinsi DKI Jakarta Cukup Terkendali

*Sampai bulan Agustus, laju inflasi selama tahun 2017 mencapai 2,86 persen  
Inflasi yang terjadi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan hanya sebesar 1,33 persen*

Bobot inflasi DKI Jakarta terhadap inflasi nasional paling besar dibandingkan dengan provinsi lain yaitu sekitar 20,16 persen. Kontribusi ini membuat pergerakan harga di DKI Jakarta bisa memberi andil yang cukup besar pada pergerakan harga pada level nasional. Dalam beberapa tahun terakhir perubahan harga di Jakarta relatif terkendali, hanya pada tahun 2013 dan 2014 saja inflasi di DKI Jakarta sempat berada dikisaran 8 persen. Pada waktu itu terjadi penyesuaian harga BBM yang dilakukan pemerintah sehingga mendorong terjadinya inflasi.

Sampai dengan bulan Agustus 2017 laju inflasi DKI Jakarta tahun 2017 sudah mencapai 2,86 persen. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,53 persen. Besaran inflasi tersebut masih cukup terkendali mengingat target yang ditetapkan pemerintah dalam APBNP 2017 yaitu sebesar 4,3 persen.

Secara *year on year*, inflasi Agustus 2017 (Persentase perubahan IHK Agustus 2017 terhadap IHK Agustus 2016) sebesar 3,82 persen. Bila keadaan stabil, maka nilai tersebut mengindikasikan bahwa di akhir tahun kalender 2017 nanti, besaran inflasi akan berada di kisaran angka tersebut. Kenaikan IHK paling besar ada pada kelompok Transportasi yang selama 12 bulan terakhir telah terjadi inflasi sebesar 5,78 persen, diikuti oleh kelompok pengeluaran Perumahan dan kelompok pengeluaran Makanan Jadi yang masing-masing sebesar 4,83 persen dan 4,26 persen.

Ada satu fenomena menarik yang tampak yang terjadi di DKI Jakarta terlihat dalam tabel di samping. Pada kelompok pengeluaran untuk Transportasi terjadi deflasi atau penurunan harga secara umum. Hal tersebut menunjukkan semakin murah dan efisiennya biaya transportasi di ibukota ditunjukkan dengan begitu maraknya transportasi berbasis aplikasi serta subsidi yang cukup besar pada transportasi publik massal seperti TransJakarta dan Commuter Line.

Laju Inflasi DKI Jakarta dan Nasional, 2014 - 2017 (Persen)



Laju Inflasi DKI Jakarta Menurut Kelompok Pengeluaran, kondisi sampai bulan Agustus 2017

Kelompok Pengeluaran	Laju Inflasi	
	Tahun 2017 *)	Tahun ke Tahun **)
Umum	2,86	3,82
Bahan Makanan	1,33	2,03
Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3,34	4,26
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	2,93	4,83
Sandang	3,80	2,71
Kesehatan	1,88	2,62
Pendidikan,Rekreasi dan Olahraga	0,66	0,43
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	4,20	5,78

Sumber : Berita Resmi Statistik, Edisi September 2017.

Catatan:

\*) Tahun 2017 adalah Persentase perubahan IHK Agustus 2017 terhadap bulan Desember 2016.

\*\*) Persentase perubahan IHK Agustus 2017 terhadap bulan Agustus 2016

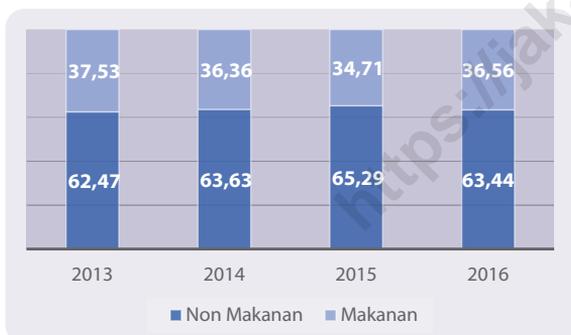
## Ketimpangan Pendapatan Penduduk DKI Jakarta Semakin Mengecil

Indeks Gini yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan suatu masyarakat, Hasil Susenas Maret 2016 mencapai nilai 0,411 berada diatas angka nasional 0,397

### Pengeluaran Rata-rata per kapita per bulan Menurut Kelompok Pengeluaran, (Rp 000)



### Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan untuk Konsumsi Makanan dan Bukan Makanan



Sumber : Susenas 2013-2016

### Distribusi Pendapatan Penduduk (GINI Rasio)

Periode Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)	DKI Jakarta	Nasional		
		Perkotaan + Pedesaan	Perkotaan	Pedesaan
Maret 2015	0,431	0,408	0,428	0,334
September 2015	0,421	0,402	0,419	0,329
Maret 2016	0,411	0,397	0,410	0,327
September 2016	0,397	0,394	0,409	0,316
Maret 2017	0,413	0,393	0,407	0,320

Sumber: Berita Resmi Statistik, BPS

Pengeluaran penduduk per kapita di Jakarta merupakan pengeluaran yang paling besar dibandingkan provinsi lainnya. Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk DKI Jakarta tahun 2015 sebesar Rp.1.772 ribu, naik sekitar 6,68 persen dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp.1.661 ribu. Kenaikan upah minimum pada tahun 2015 ditengarai juga ikut memberikan andil pada kenaikan pengeluaran penduduk perkapita di DKI Jakarta.

Sebagian besar pengeluaran penduduk DKI Jakarta digunakan untuk konsumsi non makanan yaitu 65,29 persen dari total pengeluaran dan sisanya 34,71 persen untuk konsumsi makanan. Dalam kurun waktu tahun 2013-2015 komposisi pengeluaran non makanan terjadi sedikit peningkatan sejalan dengan itu proporsi konsumsi makanan menunjukkan tren penurunan. Pengeluaran untuk kebutuhan perumahan, bahan bakar, penerangan dan air menghabiskan lebih dari setengah konsumsi non-makanan. Sementara konsumsi makanan dan minuman jadi memiliki proporsi sekitar 40 persen dari total konsumsi makanan.

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 sampai dengan 1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio di DKI Jakarta pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,413 atau meningkat dibanding September 2016 yang mencapai 0,397. Hal ini diartikan bahwa jurang ketimpangan pendapatan masyarakat ibukota semakin melebar. Akan tetapi kondisi tersebut masih lebih baik dibanding dengan apa yang terjadi pada tahun 2015.

Angka Gini Ratio DKI Jakarta Maret 2017 tersebut juga ternyata nilainya jauh diatas angka GINI Rasio rata-rata nasional yang hanya sebesar 0,393. Distribusi pendapatan masyarakat di DKI Jakarta memang tergolong cukup timpang namun ternyata masih di bawah Provinsi DI Yogyakarta dimana GINI rasio nya sebesar 0,432.

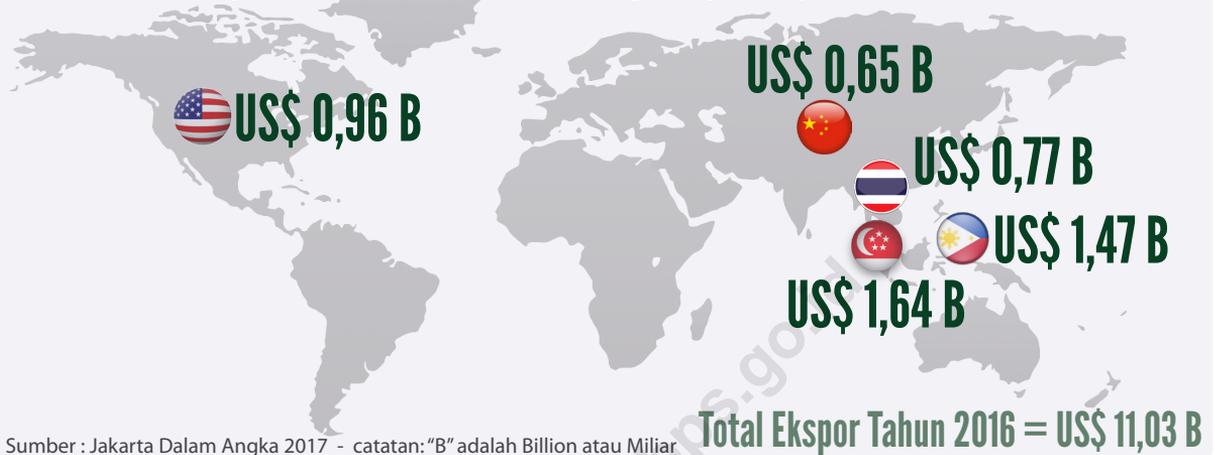
# PERDAGANGAN EKSPOR

# 19

Singapura Tetap Menjadi Negara Tujuan Ekspor Produk Jakarta Terbesar Tahun 2016

Ekspor produk DKI Jakarta telah dipapalkan ke Singapura sebanyak US\$ 1,64 Billion (15 persen), diikuti Filipina, USA, Thailand, dan Tiongkok

## Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Menurut 5 Negara Tujuan Ekspor Terbesar Tahun 2016



### EKSPOR PRODUK DKI JAKARTA

Kegiatan Ekspor barang mempunyai pengaruh langsung terhadap perekonomian suatu wilayah khususnya ekspor produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan di wilayah tersebut. Negara tujuan ekspor terbesar produk yang dihasilkan di DKI Jakarta pada tahun 2016 adalah negara Singapura yang mencapai US\$1,64 miliar atau hampir 15 persen dari total ekspor produk DKI Jakarta yang mencapai US\$11,03 miliar. Dua negara lainnya yang juga merupakan negara tujuan ekspor yang cukup besar adalah Filipina dan Amerika Serikat yang nilainya masing-masing US\$ 1,47 miliar dan US\$ 0,95 miliar. Ketiga negara mitra dagang DKI Jakarta tersebut menyumbangkan 37 persen dari total ekspor produk dari DKI Jakarta.

Selama periode Januari-Juli 2017, ekspor produk DKI Jakarta menyumbang 6,05 persen total ekspor nasional. Kinerja ekspor produk DKI Jakarta pada periode tersebut menunjukkan penurunan yang cukup signifikan yaitu dari US\$ 6,32 miliar pada periode Januari-Juli 2016 menjadi US\$ 5,13 miliar pada tahun 2017 (turun 19 persen). Produk ekspor Kendaraan dan bagiannya mengalami penurunan sampai 50 persen. Penurunan juga terjadi pada dua komoditas utama lainnya.

## 2016

## 2017

### Perbandingan Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta Periode Januari s.d Juli (dalam US\$ Miliar)

1,81



0,97 ↓

1,05



0,94 ↓

0,50

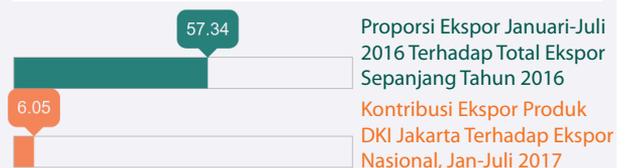


0,35 ↓

6,32



5,13 ↓



Sumber : Berita Resmi Statistik, Edisi September 2016 & 2017

# 19

## PERDAGANGAN IMPOR

### Impor Terbesar yang Melalui DKI Jakarta Berasal dari China dan Jepang

Dari total impor sebesar US\$84,6 miliar selama tahun 2014, impor dari China mencapai 23,8 persen. Sementara Impor dari total negara di Asia mencapai 77,28 persen.

#### Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Menurut Negara Asal Impor Terbesar Tahun 2016



Sumber : Jakarta Dalam Angka 2017 - catatan: "B" adalah Billion atau Miliar

### 2016

### 2017

#### Perbandingan Nilai Impor Melalui DKI Jakarta Periode Januari s.d Juli (dalam US\$ Billion)



55,40

Proporsi Impor Jan-Juli 2016 Terhadap Total Impor Sepanjang Tahun 2016

61,54

Kontribusi Impor Melalui DKI Jakarta Terhadap Impor Nasional Jan-Juli 2017

Sumber : Berita Resmi Statistik, Edisi September 2016 & 2017

#### IMPOR MELALUI DKI JAKARTA

Kegiatan impor yang masuk melalui pelabuhan bongkar di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2016 mencapai US\$71,44 miliar. Angka tersebut lebih dari setengah total impor ke Indonesia (55,40%). Negara yang memasukkan barangnya melalui DKI Jakarta paling tinggi dikirimkan dari negeri tirai bambu, RRT yang mencapai US\$18,17 miliar. Diikuti oleh Jepang dan Thailand masing-masing sebesar US\$10,39 miliar dan US\$6,06 miliar. Total impor ketiga negara tersebut mencapai lebih dari 60 persen total impor melalui DKI Jakarta. Ketiga negara tersebut merupakan mitra dagang yang sangat penting bagi perekonomian nasional khususnya DKI Jakarta.

Total Impor yang melalui pelabuhan bongkar di DKI Jakarta selama periode bulan Januari sampai dengan Juli tahun 2017, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya kembali mengalami peningkatan yang cukup tajam yaitu 12,63 persen yaitu dari US\$39,58 miliar menjadi US\$44,80 miliar.

Kontribusi impor melalui DKI Jakarta terhadap total impor secara nasional pada periode Januari sampai Juli 2017 mencapai 61,54 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Provinsi DKI Jakarta memerankan posisi yang sangat penting dalam perdagangan internasional di Indonesia.

# PENDAPATAN REGIONAL

# 20

## Perekonomian DKI Jakarta Semester 1 - 2017 Membaik

Sektor informasi dan komunikasi menjadi sumber pertumbuhan terbesar ekonomi Jakarta, sekaligus menjadi sektor dengan laju pertumbuhan paling tinggi pada semester pertama 2017

Sepanjang tahun 2011-2016 pertumbuhan ekonomi tahunan menunjukkan tren melambat, namun tetap tumbuh positif di atas angka pertumbuhan nasional. Perlambatan ini terutama dipengaruhi perekonomian global yang masih belum stabil termasuk perlambatan ekonomi Tiongkok dan Eropa. Pada semester pertama 2017, terjadi sedikit percepatan dimana ekonomi Jakarta berhasil tumbuh 5,96 persen.

Pada tahun 2016, kontribusinya terhadap PDB nasional sebesar 17,55 persen. Kontribusi yang cukup besar ini menjadikan perekonomian Jakarta sebagai motor perekonomian nasional. Struktur ekonomi Jakarta sangat didominasi oleh kelompok sektor tersier (*non-tradable*). Pada semester pertama 2017, peranan sektor tersier mencapai 73,08 persen, jauh menguasai sektor primer dan sekunder. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi Jakarta didominasi oleh peranan sektor *non-tradable* tersebut.

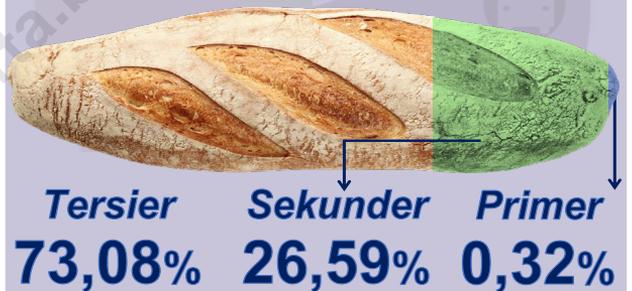
Dari sisi produksi (*supply*), penyusunan PDRB dilakukan berdasarkan faktor produksi menurut sektor lapangan usaha. Pada semester pertama 2017, penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi adalah sektor perdagangan besar & eceran, serta reparasi mobil & motor (kategori G) mencapai 16,64 persen dari total produk Jakarta. Hal ini sejalan dengan hasil kegiatan Listing Sensus Ekonomi 2016 dimana unit usaha terbesar di Provinsi DKI Jakarta adalah sektor perdagangan. Kontributor terbesar berikutnya adalah sektor industri pengolahan (13,59 persen), konstruksi (12,64 persen), dan jasa keuangan (10,66 persen).

Dari sisi konsumsi (*demand*), kontribusi perekonomian Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Konsumsi masyarakat ibukota sebagian besar adalah barang-barang non makanan, diantaranya transportasi dan perumahan. Hal ini sejalan dengan karakteristik masyarakat perkotaan. Pada semester pertama 2017, konsumsi rumah tangga menyumbangkan

### Laju Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta, 2010 s.d Semester 1-2017



### Kontribusi Sektor Perekonomian DKI Jakarta, Triwulan 2 - 2017

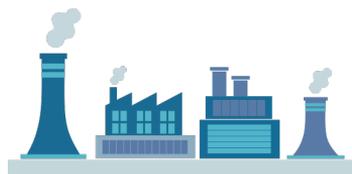


Sumber: Nerwilis, BPS Provinsi DKI Jakarta

**fyi,**

Sektor perekonomian dapat digolongkan menjadi tiga yaitu sektor primer (pertanian & pertambangan), sektor sekunder (industri, listrik, air, gas, & konstruksi), dan sektor tersier (perdagangan, transportasi, infokom, jasa, dll)

### SUPPLY



### DEMAND



# 20

## PENDAPATAN REGIONAL

**PDRB DKI Jakarta 2016 mencapai Rp 2.177,12 Triliun (ADHB)**

*Pertumbuhan ekonomi di ibukota didorong oleh membaiknya konsumsi rumah tangga dan terjaganya daya beli masyarakat yang ditopang terkendalinya inflasi.*



### Semester 1 - 2017

#### **Ekonomi Jakarta tumbuh 6,20 persen**

*"Pertumbuhan ekonomi Jakarta selalu lebih tinggi dibandingkan angka nasional, menjadikan Provinsi DKI Jakarta sebagai penggerak perekonomian nasional"*



59,34 persen dari seluruh perekonomian Jakarta. Berikutnya adalah komponen Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang mampu menyumbang sebesar 38,28 persen. PMTB ini merupakan investasi para pelaku ekonomi di ibukota. Sedikit mengalami penurunan namun tetap menjadi komponen ekonomi yang dominan dari sisi pengeluaran.

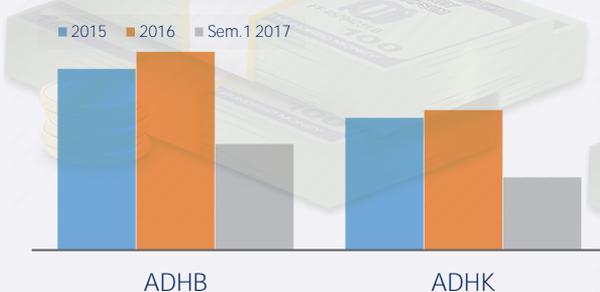
Ekonomi Jakarta mampu tumbuh sebesar 6,20 persen dengan nilai produk sebesar Rp 1.164,89 triliun sepanjang semester 1-2017. Sumber pertumbuhan terbesar dari laju tersebut adalah sektor informasi dan komunikasi dan sekaligus menjadi sektor dengan laju pertumbuhan paling tinggi. Hal ini sejalan dengan makin berkembangnya *Information Technology* (IT) berbasis internet yang digunakan oleh berbagai pelaku ekonomi selaku produsen dan konsumen. Era globalisasi yang modern dan canggih menjadikan teknologi merambah di hampir setiap sisi kehidupan masyarakat.

Total PDRB atas dasar harga berlaku (adhb) tahun 2016 mencapai Rp 2.177,12 triliun. Dengan total penduduk sebesar 10.277.628 jiwa, PDRB per kapita DKI Jakarta mencapai Rp 211,83 juta. Angka yang cukup besar untuk mengindikasikan majunya perekonomian suatu wilayah. Demikian halnya untuk PDRB atas dasar harga konstan (adhk) yang merupakan indikator produktifitas, produk tahun 2016 lebih tinggi dibandingkan 2015 yaitu sebesar Rp 1.539,38 triliun atau tumbuh sebesar 5,85 persen.

### fyi

*"PDRB per kapita Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebesar Rp 211,83 Juta atau sebesar 15.766 USD"  
(kurs tengah BI 1USD = Rp 13.436)*

**PDRB Provinsi DKI Jakarta ADHB dan ADHK, 2015 s.d Sem.1-2017**



**Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta, 2015 s.d Sem.1-2017**



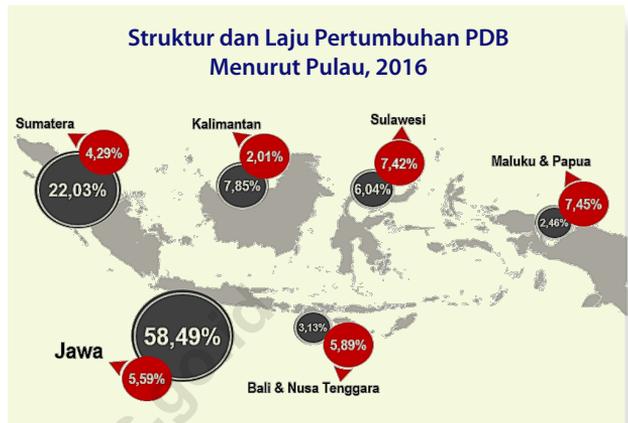
Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

## Pulau Jawa Memberi Kontribusi Lebih dari 58 Persen PDB Nasional

Tahun 2016, Pulau Jawa mampu menyumbang 58,49 persen dari total PDB nasional menjadikan Pulau Jawa sebagai tulang punggung perekonomian di Indonesia

Dengan luas 139.000 km<sup>2</sup> atau sekitar 7 persen dari luas daratan Indonesia dan didiami oleh sekitar 60 persen penduduk Indonesia, menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat perekonomian di Indonesia. Infrastruktur yang lengkap sekaligus keterjangkauan berbagai fasilitas karena merupakan pusat pemerintah membuat penduduk lebih memilih Pulau Jawa untuk melakukan aktivitas ekonominya dan membuat investor memilih menanamkan modalnya disana. Ekonomi Indonesia secara dominan disumbang dari provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kontributor terbesar adalah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat.

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2016 tercatat sebesar 5,02 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 4,88 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut berasal dari kelompok sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Pada periode yang sama, seluruh provinsi di Pulau Jawa mencapai pertumbuhan ekonomi di atas pertumbuhan Nasional. Pertumbuhan ekonomi tertinggi di wilayah Jawa dicapai oleh Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 5,85 persen, diikuti Jawa Barat dan Jawa Timur masing-masing sebesar 5,67 dan 5,55 persen. Hal ini terjadi karena perekonomian provinsi-provinsi di Pulau Jawa didominasi sektor selain kelompok sektor primer sehingga pertumbuhan ekonominya mampu berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat lima provinsi dari enam provinsi di Pulau Jawa yang perkonomiannya didominasi oleh sektor industri pengolahan. Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan kekuatan sektor industri pengolahan terbesar, dimana 43 persen ekonominya ditopang sektor tersebut. Sementara perekonomian Provinsi DKI Jakarta, sebagai provinsi dengan kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia (menyumbangkan 17,54 persen dari total PDB nasional), bertumpu pada sektor perdagangan dengan kontribusi sebesar 16,54 persen dari total PDRB DKI Jakarta.



Sumber: Dihimpun dari Berita Resmi Statistik (BRS), 2017

**fyi** PDRB a.d.h. Berlaku Provinsi DKI Jakarta tahun 2016 sebesar Rp 2 177 Triliun serta mampu memberikan kontribusi 17,54 persen pada perekonomian nasional

### Perbandingan Perekonomian Regional, 2016

Provinsi	Pertum. Ekonomi Th. 2016	Dominasi Ekonomi	
		Sektoral	Wilayah
DKI Jakarta	5,85	Perdagangan [17%]	Jakarta Pusat [24%]
Jawa Barat	5,67	Industri Pengolahan [43%]	Kab. Bekasi [16%]
Jawa Tengah	5,28	Industri Pengolahan [35%]	Kota Semarang [21%]
DI Yogyakarta	5,05	Industri Pengolahan [13%]	Kab. Sleman [29%]
Jawa Timur	5,55	Industri Pengolahan [29%]	Kota Surabaya [27%]
Banten	5,26	Industri Pengolahan [33%]	Kota Tangerang [25%]
INDONESIA	5,02	Industri Pengolahan [21%]	Prov. DKI Jakarta [17%]

Sumber: Dihimpun dari Berita Resmi Statistik (BRS), 2017

Garis kemiskinan di DKI Jakarta adalah tertinggi di Indonesia: Rp. 510.359,-

Tingkat pengangguran terendah berada di Provinsi DIY, yaitu sebesar 2,81% sementara tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang tertinggi adalah di DKI Jakarta

#### Perbandingan Beberapa Indikator Regional, 2016/2017

Uraian	Tingkat Kemiskinan Maret 2017 (%)	Pengangguran Feb 2017 (%)	IPM 2016
DKI Jakarta	3,77	5,36	79,60
DI Yogyakarta	13,02	2,84	78,38
Banten	5,45	7,75	70,96
Jawa Barat	8,71	8,49	70,05
Jawa Tengah	13,01	4,15	69,98
Jawa Timur	11,70	4,10	69,74
INDONESIA	10,64	5,33	70,18

Dihimpun dari berbagai sumber, BPS (2017)

**fyi,** “Jakarta adalah provinsi dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2016 tertinggi di Indonesia, dengan nilai indeks 79,6 kemudian diikuti oleh DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur dengan nilai indeks masing-masing 78,38 dan 74,59. Sementara nilai IPM Jawa Timur adalah yang terendah di Pulau Jawa”

#### Karakteristik Pembentuk IPM Provinsi di Pulau Jawa, 2016

Provinsi	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp. Juta)
DKI Jakarta	72,49	12,73	10,88	17,46
DI Yogyakarta	74,71	15,23	9,12	13,23
Jawa Tengah	74,02	12,45	7,15	10,15
Jawa Barat	72,44	12,30	7,95	10,04
Jawa Timur	70,74	12,98	7,23	10,72
Banten	69,46	12,70	8,37	11,47
INDONESIA	70,90	12,72	7,95	10,42

Dihimpun dari berbagai sumber, BPS (2017)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) kondisi Februari 2017 menurut provinsi di wilayah Pulau Jawa, yang terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu 8,49 persen, sementara TPT DKI Jakarta mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya serta berada di posisi ketiga terendah di kawasan Jawa, yaitu sebesar 5,36 persen. Daya tarik lain yang mengundang orang untuk datang dan mengadu nasib di Jakarta adalah nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan provinsi lain di Jawa, yaitu mencapai Rp 3,36 juta pada tahun 2016.

Minggeliatnya berbagai moda transportasi online menjadi pemicu berkurangnya angka pengangguran di DKI Jakarta. Di samping penciptaan lapangan kerja yang didorong oleh kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan program padat karya berupa pasukan oranye yaitu Pekerja Penanganan Sarana dan Prasarana Umum (PPSU). Mereka tersebar di seluruh kelurahan di DKI Jakarta dengan mempekerjakan penduduk sekitar.

Selanjutnya, bila dilihat dari tingkat kemiskinan di wilayah Pulau Jawa, Provinsi DKI Jakarta selalu menduduki peringkat yang terendah meskipun garis kemiskinan DKI Jakarta berada jauh di atas garis kemiskinan provinsi lain. Selain itu, kemiskinan di DKI Jakarta memiliki tipikal yang berbeda dengan provinsi lainnya, karena kemiskinan di Jakarta adalah yang disebut sebagai masyarakat miskin kota, terdiri dari pendatang dengan keterbatasan kemampuan dan modal. Sementara di provinsi lain, seperti yang terjadi di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, kemiskinan didominasi oleh kemiskinan di daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan petani.

Keberhasilan suatu pembangunan bukan hanya terletak pada capaian di bidang ekonomi semata seperti misalnya angka pertumbuhan ekonomi, akan tetapi manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek dari pembangunan itu sendiri perlu diukur tingkat kesejahteraannya. Indeks pembangunan manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di suatu daerah. Pada tahun 2016, Jakarta menempati peringkat pertama diantara provinsi lainnya.

# Lampiran Tabel

<https://jakarta.bps.go.id>



**Tabel 1. Jumlah PNS di Provinsi DKI Jakarta Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2016 (orang)**

Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD	1 126	42	1 168
SLTP	1 654	172	1 826
SLTA	15 816	12 711	28 527
Diploma I,II	513	1 333	1 846
Diploma III/Sarjana Muda	1 865	3 412	5 277
Tingkat Sarjana/Doktor/Ph.d	13 799	18 775	32 574
<b>Jumlah</b>	<b>34 773</b>	<b>36 445</b>	<b>71 218</b>

**Tabel 2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Administrasi, 2013-2015 (persen)**

Kabupaten/Kota Adm	TPT			TPAK		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kepulauan Seribu	6,03	5,42	5,51	63,73	68,04	63,37
Jakarta Selatan	8,56	7,56	6,36	66,62	66,62	67,75
Jakarta Timur	9,47	8,72	9,13	65,20	64,83	64,55
Jakarta Pusat	8,60	7,81	6,51	77,99	67,75	64,99
Jakarta Barat	8,69	9,00	6,31	70,28	68,14	67,76
Jakarta Utara	9,67	8,88	7,11	66,20	66,68	66,45
Jumlah	9,02	8,47	7,23	68,09	66,61	66,39

**Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten / Kota Administrasi di DKI Jakarta, 2015 - 2016**

Kabupaten/Kota Adm.	Angka Harapan Hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (000 Rp.)		IPM	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Kepulauan Seribu	67,22	67,88	11,90	12,10	8,04	8,24	11 433	11 608	68,84	69,52
Jakarta Selatan	73,81	73,83	13,09	13,22	11,23	11,42	22 425	22 932	83,37	83,94
Jakarta Timur	74,00	74,14	13,08	13,20	11,32	11,52	16 455	16 733	80,73	81,28
Jakarta Pusat	73,60	73,76	12,96	13,09	10,88	11,01	16 143	16 493	79,69	80,22
Jakarta Barat	73,22	73,34	12,60	12,69	10,15	10,36	19 006	19 501	79,72	80,34
Jakarta Utara	72,81	72,95	12,42	12,53	10,05	10,23	17 205	17 418	78,30	78,78
Jumlah	72,27	72,49	12,59	12,73	10,70	10,88	17 075	17 468	78,99	79,60

**Tabel 4. Jumlah Sekolah, Murid dan Guru di DKI Jakarta Menurut Status Kepemilikan Sekolah dan Jenjang Sekolah, 2017**

Jenjang Sekolah	Sekolah (unit)			Murid (orang)			Guru (orang)		
	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total	Negeri	Swasta	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>TK</b>	24	2 092	2 116	1 482	92 772	94 254	148	10 183	10 331
<b>SD</b>	1 560	921	2 481	556 897	222 710	779 607	26 878	15 038	41 916
<b>SMP</b>	321	801	1 122	190 589	131 866	322 455	10 737	12 596	23 333
<b>SMA</b>	116	372	488	75 379	60 388	135 767	5 406	7 482	12 888
<b>SMK</b>	63	539	602	38 425	125 492	163 917	2 997	12 013	15 010
<b>PLB</b>	9	81	90	1 453	2 933	4 386	326	782	1 108
Jumlah	2 091	4 803	6 895	864 220	636 155	1 500 379	46 484	58 085	104 576

**Tabel 5. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Industri Besar dan Sedang Menurut Kota Adm, 2015**

Kota Adm.	Jumlah Perusahaan	Jumlah Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Rp. Milyar)
(1)	(2)	(3)	(4)
Jakarta Selatan	57	3 845	1 180,33
Jakarta Timur	285	80 006	87 206,23
Jakarta Pusat	94	4 920	2 429,90
Jakarta Barat	394	40 391	30 312,78
Jakarta Utara	493	148 940	200 717,87
<b>Jumlah</b>	<b>1 323</b>	<b>278 102</b>	<b>321 847,12</b>

**Tabel 6. Perkembangan Nilai Ekspor (FOB) dan Impor (CIF) Melalui DKI Jakarta, dan Ekspor (FOB) Produk DKI Jakarta, 2008 - Semester 1, 2017 (US\$ million )**

Tahun (Periode)	Nilai Ekspor		Nilai Impor
	Melalui DKI Jakarta	Produk DKI Jakarta	
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	36 090,17	9 393,31	63 312,74
2009	32 536,51	7 536,44	48 099,31
2010	39 648,26	8 464,90	70 069,09
2011	46 476,17	11 043,45	88 874,02
2012	48 134,85	11 800,84	96 926,33
2013	47 397,62	11 375,12	90 108,00
2014	48 079,48	11 546,19	84 604,81
2015	42 184,09	11 538,11	71 132,57
2016	46 028,27	11 029,56	71 447,13
Jan - Juni 2016	22 890,51	5 631,14	35 012,63
Jan - Juni 2017	23 811,44	4 358,17	37 254,09

**Tabel 7. Jumlah Bus Trans Jakarta, Penumpang, dan Pendapatan menurut Koridor/ Rute, 2016**

Koridor	Rute	Jumlah Penumpang (ribu orang)	Pendapatan (Rp. Milyar)
(1)	(2)	(3)	(4)
Koridor I	Blok M - Kota	23 980	80,89
Koridor II	Pulo Gadung -Harmoni	7 347	23,83
Koridor III	Harmoni - Kalideres	9 842	30,33
Koridor IV	Pulo Gadung - Dukuh Atas	6 577	21,28
Koridor V	Kp Melayu - Ancol	9 840	32,47
Koridor VI	Ragunan - Kuningan	10 012	32,64
Koridor VII	Kp Rambutan - Kp Melayu	8 823	27,73
Koridor VIII	Lebak Bulus - Harmoni	10 085	33,32
Koridor IX	Pinang Ranti - Pluit	14 368	46,91
Koridor X	Cililitan - Tanjung Priok	6 571	21,28
Koridor XI	Kp Melayu - Pulo Gebang	2 761	8,61
Koridor XII	Pluit - Tanjung Priok	1 886	6,16
BKTB		224	1,16
Bus Pariwisata		604	0,00
Bus Gratis		346	0,00
KJP & RUSUN		95	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>113 361</b>	<b>366,61</b>

**Tabel 8. Persentase Tingkat Hunian Kamar Hotel Berbintang dan Melati Menurut Bulan, 2015**

Bulan	Hotel Berbintang	Hotel Melati	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(3)
Januari	61,49	80,37	64,24
Pebruari	51,09	86,05	57,16
Maret	65,10	85,96	68,25
April	62,78	78,53	65,18
Mei	61,75	78,94	64,48
Juni	59,98	82,15	62,99
Juli	52,28	76,12	56,22
Agustus	63,33	80,15	65,79
September	56,69	84,25	60,44
Oktober	60,27	83,28	63,84
Nopember	58,53	79,71	61,69
Desember	64,52	82,36	67,40
Januari - Desember	60,27	81,44	63,49

<https://jakarta.bps.go.id>

**Tabel 9. Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), 2000 - 2015**

Tahun	PMDN		PMA	
	Proyek	Investasi (Juta Rp)	Proyek	Investasi (Ribu USD)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
2001	45	5 752 926	487	313 475
2002	44	2 225 941	561	1 234 429
2003	44	3 343 950	514	5 395 705
2004	35	4 173 915	592	1 867 972
2005	23	2 546 000	364	3 267 000
2006	29	3 088 000	330	1 472 000
2007	34	4 218 000	365	4 680 000
2008	34	1 837 000	434	9 928 000
2009	35	9 694 000	433	5 511 000
2010	86	4 598 517	886	6 428 732
2011	84	9 256 404	1 148	4 824 000
2012	72	8 540 071	1 138	4 107 721
2013	132	5 766 334	2 371	2 589 642
2014	118	17 811 428	3 053	4 509 363
2015	186	15 512 725	3 096	3 619 393

**Tabel 10. Pendapatan Agregat dan per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2013 s.d. Semester Pertama 2017**

Uraian	2013	2014	2015	2016	Semester1-2017
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)
<b>Atas Dasar Harga Berlaku</b>					
PDRB (Rp. Triliun)	1 546,88	1 762,32	1 989,33	2 177,12	1 164,89
PDRB Tanpa Migas (Rp. Triliun)	1 542,59	1 757,78	1 984,29	2 171,94	
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	155,15	174,91	195,46	207,99	
PDRB per Kapita Tanpa Migas (Rp. Juta)	154,72	174,46	194,96	207,49	
<b>Atas Dasar Harga Konstan 2000</b>					
PDRB (Rp. Triliun)	1 296,69	1 373,39	1 454,35	1 539,38	800,90
PDRB Tanpa Migas (Rp. Triliun)	1 293,69	1 370,41	1 451,39	1 536,46	
PDRB per Kapita (Rp. Juta)	130,06	136,31	142,89	147,06	
PDRB per Kapita Tanpa Migas (Rp. Juta)	129,76	136,02	142,60	146,78	
Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Jiwa)	9 969 948	10 075 310	10 177 924	10 467 600	



# DATA

## **MENCERDASKAN BANGSA**

---

